



**LAPORAN  
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022**




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, telah sesuai dengan pedoman penyusunan dan mampu menggambarkan kinerja selama tahun 2022.

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah (Dinas P3APPKB) Tahun 2022 merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja yang memuat program kegiatan, capaian kinerja dan anggaran serta realisasinya dalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran sesuai dengan Rencana Strategis Dinas P3APPKB Periode Tahun 2021 - 2026. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Palangka Raya, 06 Februari 2023

Kepala Dinas P3APPKB  
Provinsi Kalimantan Tengah,  
  
**Dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680717 199903 2 006

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
2.1 Capaian Kinerja Urusan PPPA dan PPKB .....	26
2.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan .....	29
<b>BAB III KEBIJAKAN STRATEGI YANG DITETAPKAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2021 .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
Lampiran 1 .....	42
Lampiran 2 .....	44



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai *feedback* yang berharga dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, menyelenggarakan fungsi :

1. Formula kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koorDinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB.
4. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;

7. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.
13. Pelaksanaan koorDinasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mulai bergeser pada fungsi pelayanan dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan KB, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. KoorDinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. Koordinasi pelaksanaan informasi gender dan anak skala provinsi;
8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);

9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah 4ndicator reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi.
14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro Pengendalian Penduduk dan KB ;
15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, 4ndica budaya dan lingkungan; dan
16. Penyerasian kebijakan Pengendalian Penduduk.
17. Melaksanakan fungsi Pelayanan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Sekretaris, membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Koordinator Sub Substansi Penyusunan Program
3. Kepala Bidang, terdiri dari :
  - (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
    - Koordinator Sub Substansi Pelembagaan PUG
    - Koordinator Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan



- Koordinator Sub Substansi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.

(2) Bidang Data dan Informasi, membawahi :

- Koordinator Sub Substansi Data
- Koordinator Sub Substansi Penyebarluasan Informasi
- Koordinator Sub Substansi Partisipasi Masyarakat

(3) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

- Koordinator Sub Substansi Tumbuh Kembang Anak
- Koordinator Sub Substansi Perlindungan Anak
- Koordinator Sub Substansi Pemantapan Lembaga Layanan Anak

(4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :

- Koordinator Sub Substansi Perlindungan Perempuan
- Koordinator Sub Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
- Koordinator Sub Substansi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

(5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi :

- Sub Koordinator Sub Substansi Pengendalian Penduduk.
- Sub Koordinator Sub Substansi Keluarga Sejahtera
- Sub Koordinator Sub Substansi KB

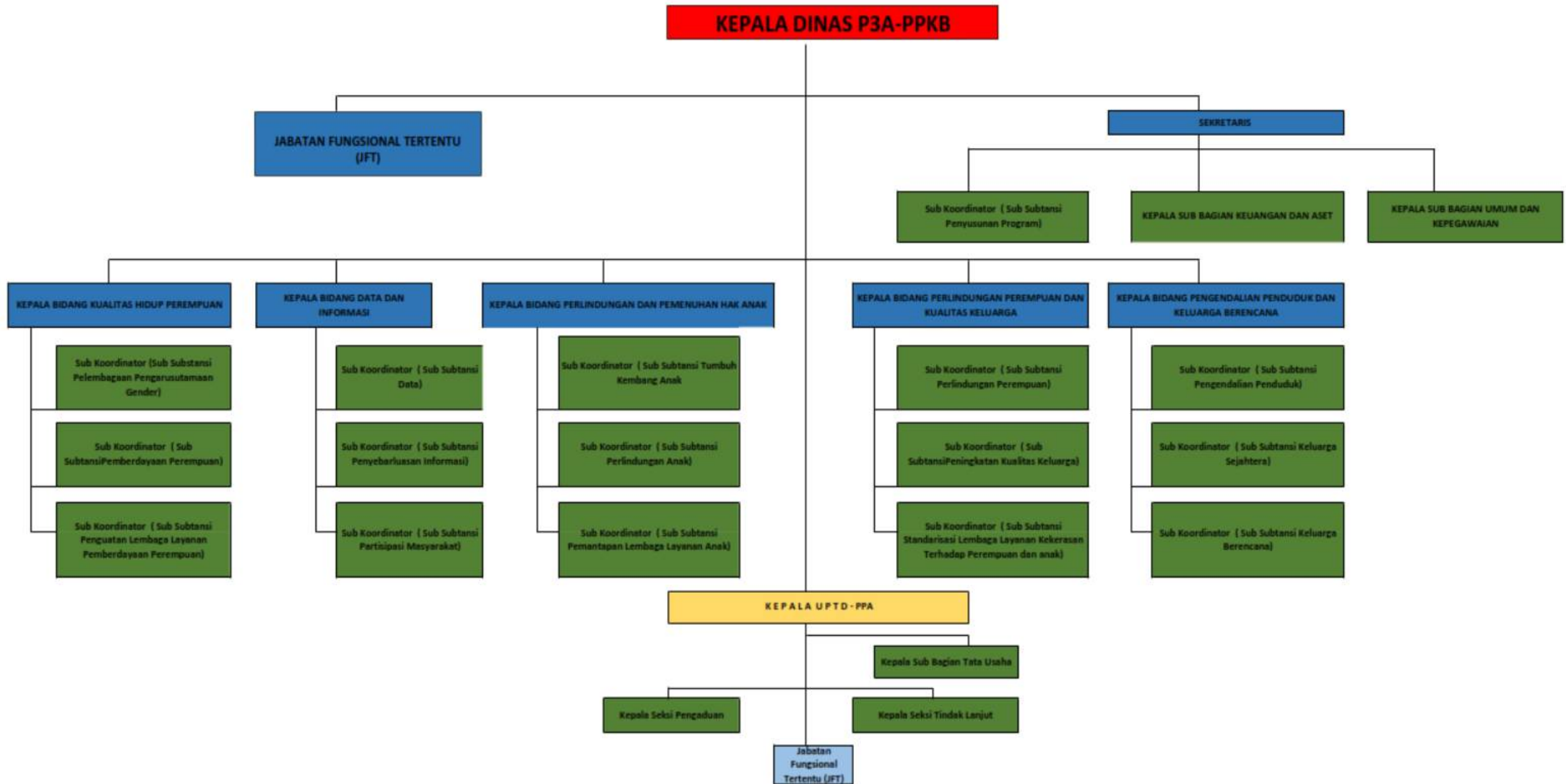
(6) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)

- Kepala Seksi Tindak Lanjut
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Pengaduan

(7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut pada gambar :

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**





### 1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka penyelesaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per desember 2022 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

- Jumlah ASN/ Tenaga Kontrak

#### Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	15	40	55
3.	Tenaga Kontra	6	4	10
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>44</b>	<b>65</b>

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

#### Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	6	6	12
2.	Golongan III	7	29	36
3.	Golongan II	4	3	7
4.	Golongan I	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>38</b>	<b>55</b>

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

- Pendidikan

#### Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SDN	0	0	0
2.	SLTP	0	0	0
3.	SLTA	4	6	10
4.	D3	0	5	5

5.	S1	7	20	27
6.	S2	3	9	12
7.	S3	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>41</b>	<b>55</b>

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karir. Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

- Struktur eselon / jabatan fungsional

#### Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Eselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1	-	1	1
2.	Sekretaris / Kabid/Kepala UPT	Eselon III	7	2	5	7
3.	Kasubbag / Kasi	Eselon IV	5	1	4	5
4.	Fungsional Tertentu	-	17	5	12	16
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	8	22	30

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

Dari data komposisi diatas bahwa ada kekosongan karena pensiun untuk jabatan

#### Komposisi Pegawai ( PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	12
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	
3.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	1	1	
4.	Pembina Tk. I	IV / b	1	2	3	36
5.	Pembina	IV / a	2	6	8	
6.	Penata Tk. I	III / d	-	13	13	
7.	Penata	III / c	3	5	8	
8.	Penata Muda Tk. I	III / b	3	10	13	
9.	Penata Muda	III / a	1	1	2	4
10.	Pengatur Tk. I	II / d	2	2	4	
11.	Pengatur	II / c	-	1	1	

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
12.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	2	-	2	7
13.	Pengatur muda	II / a	-	-	-	
14.	Juru Tk. I	I / d	-	-	-	-
15.	Juru	I / c	-	-	-	
16.	Juru muda TK. I	I/b	-	-	-	
17.	Juru Muda	I/a	-	-	-	
JUMLAH			<b>15</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

Komposisi jumlah PNS tahun 2020 sebanyak 55 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Golongan IV 12 orang, Golongan III 36 orang dan golongan II 7 orang. Adapun golongan terbanyak Golongan III sebanyak 36 orang sebesar 47,27 %. Dimana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah).

#### 1.4. Sarana dan Prasarana

*Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi*

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-		Hibah	1978	Baik	1
2	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD1	Besi/Plastik	Hibah	2009	Baik	1
3	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD1	Besi/Plastik	Hibah	2009	Baik	1
4	Lemari Besi/Metal	Brother / -	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
5	Filing Cabinet Besi	Brother / -	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
6	Brandkas	A3 / -	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
7	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2009	Baik	1
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2009	Rusak Berat	1
9	Lemari Besi/Metal	Brother / -	Besi	Pembelian	2010	Baik	1
10	Filing Cabinet Besi	Brother / -	Besi	Pembelian	2010	Baik	1
11	Personal Komputer lainnya	Intel Core i3 / -	Plastik	Pembelian	2010	Baik	1
12	Filing Cabinet Besi	Brother / -	Besi	Pembelian	2011	Baik	1
13	Meja Kerja Kayu	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2011	Rusak Berat	1
14	Kursi Rapat	Montana / -	Besi/Busa	Pembelian	2011	Baik	2
15	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2011	Baik	2
16	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother / -	Besi/Plastik	Pembelian	2012	Baik	1
17	Note Book	Thosiba Satelite / -	Plastik	Pembelian	2012	Baik	1
18	Kipas Angin	Maspion / Stand Fan	Besi/Plastik	Pembelian	2013	Baik	1

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
19	P.C Unit	Intel / Pentium 5	Besi/Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon PIXMA / -	Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
21	Pick Up	CHOVROLET DOUBLE CABIN / COLORADO LTZ CREW CAB 2.5 MT MY12	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
22	Sepeda Motor	HONDA SUPRA X 125 / NF125TR5 M/T	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
23	Sepeda Motor	HONDA SUPRA X 125 / NF125TR5 M/T	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
24	Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF 125 TR)	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
25	Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF 125 TR)	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
26	Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF 125 TR)	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
27	Scooter	HONDA / VARIO TECHNO PGM F1 (NC112A1CF A/T)	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
28	Lemari Besi/Metal	Brother / 2 Pintu	Besi	Pembelian	2014	Baik	5
29	Lemari Kayu	Lokal / -	Kayu/Kaca	Pembelian	2014	Baik	1
30	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	Besi	Pembelian	2014	Baik	7
31	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	Besi	Pembelian	2014	Baik	1
32	Kursi Kayu	Lokal / -	Rotan/Busa	Pembelian	2014	Baik	1
33	Meja Rapat	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
34	Kursi Rapat	Polaris / -	Besi/Busa	Pembelian	2014	Baik	59
35	Meubeleur lainnya	Lokal / -	Kayu/Kaca	Pembelian	2014	Baik	4
36	A.C. Split	LG / 2pk	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
37	Kipas Angin	Miyako / -	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	4



No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Kipas Angin	Miyako / -	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	2
39	Sound System	LG / -	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
40	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Jam Besar	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
41	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
42	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2014	Baik	8
43	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2014	Baik	42
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	Kayu/Busa	Pembelian	2014	Baik	1
45	Layar Film/Projector	Infokus / -	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
46	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Krezt / Wireless	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
47	P.C Unit	Acer Aspire / Intel Corei3	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	10
48	Note Book	Asus / Intel Corei3 12"	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
49	Note Book	Acer / Intel Corei3 11,6"	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	1
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon PIXMA MG2570 / -	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	2
51	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	3
52	Lemari Besi/Metal	Brother / 2 Pintu	Besi	Pembelian	2015	Baik	11
53	Papan Pengumuman	Lokal / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
54	Papan Pengumuman	Lokal / Struktur Organisasi	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
55	Meja Resepsionis	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2015	Baik	1
56	Lemari Es	Toshiba Glacio / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
57	Televisi	Panasonic	Palstik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	8

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	3
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	12
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	Plastik/Busa	Pembelian	2015	Baik	19
63	Camera Electronic	Sony / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
64	Camera Film	Nicon / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
65	Lap Top	Asus / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	4
66	Lap Top	Asus	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
67	Lap Top	Asus / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	3
68	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pixma ix6560 / A3	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pixma ix6560 / A3	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
70	Scooter	Honda Vario / Vario 125 CBS ISS	Besi	Hibah	2016	Baik	1
71	Scooter	Honda Vario / Vario 125 CBS ISS	Besi	Hibah	2016	Baik	1
72	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Daihatsu / Luxio 1.5 X M/T	Besi	Hibah	2016	Baik	1
73	Mesin Absensi	Finger Spot / -	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	2
74	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Toa / -	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	2
75	Lap Top	Apple / -	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Rusak Berat	1
76	Lap Top	Lenovo / -	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	3
77	Hard Disk	WD My Passport Ultra / -	Plastik	Pembelian	2016	Baik	3
78	Wireless	Bismarck / -	Plastik/besi	Pembelian	2018	Baik	1
79	Camera Electronic	Panasonic / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Telephone Mobile	Samsung / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
81	Note Book	Apple / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
82	Hard Disk	WD / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
85	kendaraan Dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Kijang Inova Venture / MPV	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
86	Scooter	Honda / X1H02N35M1 A/T	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
87	Scooter	Honda / X1H02N35M1 A/T	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
88	Rak Besi	Lokal / -	Besi/Kayu	Pembelian	2019	Baik	3
89	Filing Cabinet Besi	Informa / -	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
90	Kursi Besi/Metal	Informa / Kursi Tunggu	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
91	Meja Rapat	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2019	Baik	2
92	Kasur/Spring Bed	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	1
93	Kursi Rapat	Montana / -	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	40
94	Sofa	Informa / Sofa Konsultasi	Busa	Pembelian	2019	Baik	1
95	Meubeleur lainnya	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2019	Baik	4
96	A.C. Split	Panasonic / 2pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
97	A.C. Split	Panasonic / 0,5pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
98	A.C. Split	Panasonic / 1,5pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
99	A.C. Split	Panasonic / 2pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
100	A.C. Split	Panasonic / 2pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
101	A.C. Split	Panasonic / 1pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
102	A.C. Split	Panasonic / 1pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
103	Alat Pendingin lainnya	Imatsu / Air Curtain	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
104	Televisi	Panasonic / -	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
105	Televisi	Panasonic / -	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
106	Sound System	Ashly / -	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
107	Sound System	B&B / Mini	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
108	Stabilisator	Hokimotto / -	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
109	Dispenser	Sanken / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
110	Dispenser	Sanken / -	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
111	Alat Pemadam/Portable	Lokal / -	Besi	Pembelian	2019	Baik	5
112	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Informa / -	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	1
113	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Informa / -	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	3
114	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Informa / Kursi Pelayanan	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	3
115	Digital Audio Taperecorder	Sony ICD-TX650 / Voice Recorder	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
116	Camera Film	Canon / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
117	Camera Film	Canon / Mirrorless	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
118	Camera Film	Go Pro / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
119	Layar Film/Projector	Lokal / Layar Proyektor	Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
120	Layar Film/Projector	BENQ MS506p / LCD	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
121	Layar Film/Projector	View Sonic m1 / LCD Portable	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
122	Layar Film/Projector	LG PH450 / LCD Short Throw	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
123	Layar Film/Projector	GP70UP / LCD Mini	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
124	Layar Film/Projector	Epson / LCD	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
125	Handy Talky (HT)	Kenwood / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
126	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	ABN Spektrum / -	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
127	P.C Unit	Lenovo / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
128	P.C Unit	Lenovo / -	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
129	Lap Top	Lenovo / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
130	Lap Top	Asus / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
131	Note Book	Asus / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
132	Note Book	Lenovo / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
133	Personal Komputer lainnya	Samsung Galaxy / Tablet	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / M200	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
138	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
139	Camera Film	Logitech / -	Plastik	Pembelian	2020	Baik	1
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	Plastik	Pembelian	2020	Baik	4
141	Lemari Besi/Metal	Lokal / 2 Pintu	Besi	Pembelian	2021	Baik	6
142	Lemari Kayu	Lokal / Arsip	Kayu	Pembelian	2021	Baik	2

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
143	Rak Besi	Lokal / -	Besi/kayu	Pembelian	2021	Baik	6
144	Meja Rapat	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
145	Meja Resepsionis	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	2
146	Kursi Lipat	Chitose / -	Besi/Busa	Pembelian	2021	Baik	150
147	Sofa	Lokal / -	Busa	Pembelian	2021	Baik	2
148	Sofa	Lokal / -	Busa	Pembelian	2021	Baik	6
149	Lemari Es	Panasonic / 2 Pintu	Plastik	Pembelian	2021	Baik	5
150	A.C. Split	Sharp / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	10
151	A.C. Split	Sharp / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	20
152	A.C. Split	Sharp / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	42
153	Televisi	Sharp / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
154	Dispenser	Sharp / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	7
155	Mimbar/Podium	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
156	Gordyin/Kray	Shin-Inchi / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
157	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Krisbow-Generator / -	Besi	Pembelian	2021	Baik	1
158	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
159	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	6
160	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	18
161	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	52
162	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	Besi/bus	Pembelian	2021	Baik	1
163	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	Besi/bus	Pembelian	2021	Baik	6

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
164	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2021	Baik	16
165	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Chitose / -	Besi/Busa	Pembelian	2021	Baik	7
166	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Chitose / -	Besi/Busa	Pembelian	2021	Baik	45
167	Professional Sound System	Yamaha Audioline / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
168	Tripod Camera	ProGear (FotoPro) / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
169	Tripod Camera	ProGear (FoxPro) / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
170	Lighting Stand Tripod	GVM / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	2
171	Camera Digital	Nikon / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	2
172	Video Conference	Logitech / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
173	Alat Studio Lainnya	Hikvision / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
174	Alat Studio Lainnya	Epson / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
175	P.C Unit	HP / All in One	Plastik	Pembelian	2021	Baik	8
176	P.C Unit	Asus / Desktop	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
177	Lap Top	Dell / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	3
178	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
179	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / A3	Plastik	Pembelian	2021	Baik	3
180	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	2021	Baik	1
181	Jaringan listrik lainnya	-		Pembelian	2021	Baik	1
182	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Brother / GX-6750	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
183	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Besi 3 rak	Besi	Pembelian	2022	Baik	1
184	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Besi 3 Rak	Besi	Pembelian	2022	Baik	1

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
185	Lemari Kayu	Lokal / Loker	Kayu	Pembelian	2022	Baik	2
186	Lemari Kaca	Lokal / Lemari Pakaian	Kayu-Kaca	Pembelian	2022	Baik	1
187	Lemari Kaca	Lokal / Lemari Sepatu	Kayu-Kaca	Pembelian	2022	Baik	1
188	Papan Pengumuman	Lokal / Struktur Organisasi	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
189	Papan Pengumuman	Lokal / whiteboard interaktif	Kayu-Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
190	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	Besi-Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
191	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
192	Papan Pengumuman	Lokal / Papapn Pengumuman	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
193	Alat Studio Lainnya	P8 Outdoor	-	Pembelian	2022	Baik	1
194	Telephone Mobile	Realme / 5G	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
195	Telephone Mobile	Samsung Galaxy A23 / Android	Plastik	Pembelian	2022	Baik	2
196	P.C Unit	HP / All in one PC	Plastik	Pembelian	2022	Baik	5
197	Note Book	MSI CF633 / Core i7	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
198	Note Book	MSI Pulse / Core i9	Plastik	Pembelian	2022	Baik	2
199	Tablet PC	Samsung Galaxy / Android Tab S6	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
200	Hard Disk	Seagate / One Touch 1 T	Plastik	Pembelian	2022	Baik	5
201	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Epson / Workforce ES-50 Portable	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
202	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laserjet	Palstik	Pembelian	2022	Baik	1
203	Peralatan Personal Komputer lainnya	Inforce / Uninterrupterible Power Suply (UPS)	Plastik	Pembelian	2022	Baik	4
204	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	Beton	Pembelian	2022	Baik	1
205	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	Beton	Pembelian	2022	Baik	1



No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
206	Meja Komputer	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2011	Rusak Berat	1

Sumber : Subbag Keuangan & Aset. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

### 1.5. Keuangan

Anggaran pendapatan/belanja, realisasi dan serapan anggaran per program dan kegiatan

**TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022 PER 31 DESEMBER 2022**

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Keuangan		Fisik (%)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
I	<b>Belanja Tidak Langsung BTL :</b>				
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.993.084.912</b>	<b>6.213.059.649</b>	<b>88,85</b>	<b>88,85</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
II	<b>Belanja Langsung :</b>				
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>4.336.509.186</b>	<b>3.576.262.346</b>	<b>82,47</b>	<b>82,47</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>270.242.850</b>	<b>262.761.306</b>	<b>97,23</b>	<b>97,23</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.499.900	15.472.750	99,82	99,82
	KoorDinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.638.100	23.613.000	99,89	99,89
	KoorDinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.208.500	26.198.000	99,96	99,96
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.896.350	197.477.556	96,38	96,38
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>71.500.000</b>	<b>71.142.180</b>	<b>99,50</b>	<b>99,50</b>
	KoorDinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000	100,00	100,00

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Keuangan		Fisik (%)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	65.000.000	64.642.180	99,45	99,45
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.500.000	13.500.000	100,00	100,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>49.642.000</b>	<b>23.525.860</b>	<b>47,39</b>	<b>47,39</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.642.000	23.525.860	47,39	47,39
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.673.032.826</b>	<b>1.659.154.204</b>	<b>99,17</b>	<b>99,17</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.504.000	26.504.000	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.640.000	91.356.000	95,52	95,52
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.000.000	61.999.800	100,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.825.000	22.695.000	99,43	99,43
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	396.900.000	396.522.000	99,90	100
	Penyelenggaraan Rapat KoorDinasi dan Konsultasi SKPD	996.958.826	987.948.404	99,10	99,10
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.205.000	72.129.000	99,89	99,89
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>627.969.000</b>	<b>607.389.000</b>	<b>96,72</b>	<b>96,72</b>
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	400.469.000	381.426.000	95,24	95,24
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.500.000	225.963.000	99,32	99,32
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.508.236.260</b>	<b>831.819.283</b>	<b>55,15</b>	<b>55,15</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	10.500.000	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	278.713.860	232.149.283	83,29	83,29
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.022.400	589.170.000	48,33	48,33
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>122.386.250</b>	<b>106.970.513</b>	<b>87,40</b>	<b>87,40</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.166.250	68.800.513	94,03	94,03
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.220.000	38.170.000	77,55	77,55
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>1.283.531.350</b>	<b>1.252.050.952</b>	<b>97,55</b>	<b>97,55</b>
	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>188.500.000</b>	<b>165.512.102</b>	<b>87,80</b>	<b>87,80</b>
	KoorDinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	70.000.000	47.573.570	67,96	67,96
	KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	70.000.000	69.540.730	99,34	99,34

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Keuangan		Fisik (%)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	48.500.000	48.397.802	99,79	99,79
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>1.069.681.350</b>	<b>1.062.513.850</b>	<b>99,33</b>	<b>99,33</b>
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	955.000.000	951.377.400	99,62	99,62
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	114.681.350	111.136.450	96,91	96,91
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>25.350.000</b>	<b>24.025.000</b>	<b>94,77</b>	<b>94,77</b>
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemerdayaan perempuan kewenangan provinsi	25.350.000	24.025.000	94,77	94,77
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>681.024.621</b>	<b>670.752.283</b>	<b>98,49</b>	<b>98,49</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>406.027.000</b>	<b>398.716.655</b>	<b>98,20</b>	<b>98,20</b>
	KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	47.921.000	47.775.000	99,70	99,70
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	358.106.000	350.941.655	98,00	98,00
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan KoorDinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>221.427.577</b>	<b>218.565.628</b>	<b>98,71</b>	<b>98,71</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	130.907.577	128.490.628	98,15	98,15
	KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	90.520.000	90.075.000	99,51	99,51
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>53.570.044</b>	<b>53.470.000</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	48.570.044	48.470.000	99,79	99,79
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>157.547.750</b>	<b>151.913.250</b>	<b>96,42</b>	<b>96,42</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>74.398.750</b>	<b>71.209.250</b>	<b>95,71</b>	<b>95,71</b>
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	74.398.750	71.209.250	95,71	95,71
	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>83.149.000</b>	<b>80.704.000</b>	<b>97,06</b>	<b>97,06</b>
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	83.149.000	80.704.000	97,06	97,06
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>218.245.000</b>	<b>211.606.300</b>	<b>96,96</b>	<b>96,96</b>
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>218.245.000</b>	<b>211.606.300</b>	<b>96,96</b>	<b>96,96</b>
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	67.320.000	65.838.000	97,80	97,80
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150.925.000	145.768.300	96,58	96,58
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>360.341.370</b>	<b>353.945.344</b>	<b>98,23</b>	<b>98,23</b>

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Keuangan		Fisik (%)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>233.795.650</b>	<b>232.501.100</b>	<b>99,45</b>	<b>99,45</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	161.187.650	160.072.100	99,31	99,31
	KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	72.608.000	72.429.000	99,75	99,75
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>126.545.720</b>	<b>121.444.244</b>	<b>95,97</b>	<b>95,97</b>
	KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	61.484.000	59.493.744	96,76	96,76
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65.061.720	61.950.500	95,22	95,22
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>432.702.000</b>	<b>430.340.150</b>	<b>99,45</b>	<b>99,45</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75.450.000</b>	<b>75.228.000</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
	KoorDinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	75.450.000	75.228.000	99,71	99,71
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan KoorDinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>305.946.000</b>	<b>304.757.800</b>	<b>99,61</b>	<b>99,61</b>
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	130.902.000	130.118.800	99,40	99,40
	KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	175.044.000	174.639.000	99,77	99,77
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>51.306.000</b>	<b>50.354.350</b>	<b>98,15</b>	<b>98,15</b>
	KoorDinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	51.306.000	50.354.350	98,15	98,15
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>198.477.300</b>	<b>136.596.300</b>	<b>68,82</b>	<b>68,82</b>
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>198.477.300</b>	<b>136.596.300</b>	<b>68,82</b>	<b>68,82</b>
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Pengendalian Penduduk (GDPK) Tingkat Provinsi	150.000.000	90.582.500	60,39	60,39
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	48.477.300	46.013.800	94,92	94,92
<b>9</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>136.994.500</b>	<b>127.029.850</b>	<b>92,73</b>	<b>92,73</b>
	<b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>52.024.500</b>	<b>48.253.000</b>	<b>92,75</b>	<b>92,75</b>
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	52.024.500	48.253.000	92,75	92,75
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>84.970.000</b>	<b>78.776.850</b>	<b>92,71</b>	<b>92,71</b>
	Pembinaan Promosi Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK dan Konseling Kesehatan Reproduksi	84.970.000	78.776.850	92,71	92,71
<b>10</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>147.287.500</b>	<b>141.602.500</b>	<b>96,14</b>	<b>96,14</b>
	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>147.287.500</b>	<b>141.602.500</b>	<b>96,14</b>	<b>96,14</b>

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Keuangan		Fisik (%)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	147.287.500	141.602.500	96,14	96,14
	Jumlah BTL*)	6.993.084.912	6.213.059.649	88,85	88,85
	Jumlah BL**)	7.952.660.577	7.052.099.275	88,68	100,00
	<b>TOTAL (BTL + BL)***)</b>	14.945.745.489	13.265.158.924	88,76	99,38

## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **2.1 CAPAIAN KINERJA URUSAN PPPA DAN PPKB**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Perangkat Daerah DINAS P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) koorDinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- d) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- e) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- f) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- g) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- h) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;

- i) pengelolaan kesekretariatan Perangkat Daerah DINAS P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud untuk dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Perangkat Daerah DINAS P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) koorDinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan KB.
- 4) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- 5) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja								PD Penanggung Jawab	
			2022					2023	2024	2025		2026
			Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Target	Target	Target		Target
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>												
II.	Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar											
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,88	81,90	82,02	82,02	82,08	82,08	81,92	81,94	81,96	81,98	DP3AP2KB
2.2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,43	3,43	1,12	1,12	3,38	3,38	3,50	3,60	3,70	4,00	DP3AP2KB
2.3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85	85	75	75	92,11	92,11	87,5	90	92,5	95	DP3AP2KB
2.4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	61,83	61,52	61,52	61,52	61,83	63,68	65,59	67,55	69,57	DP3AP2KB
2.5	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	50	50	84	84	93,59	93,59	55	60	65	70	DP3AP2KB
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	54,01	54,01	54,01	51,65	62,44	64,55	64,55	64,55	DP3AP2KB
8.2	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2,10	2,10	2,24	2,24	2,24	2,31	2,06	2,00	1,96	1,96	DP3AP2KB
8.3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mPCR)	73,23	73,23	20	20	20	67,17	73,68	74,26	74,76	74,76	DP3AP2KB
8.4	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,36	5,36	63,98	63,98	12,4	12,4	5,18	5,00	5,01	5,01	DP3AP2KB
8.5	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	21	21	13	13	19,51	36,2	20	18	16	16	DP3AP2KB

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022



## **2.2 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator tersebut adalah sebagai berikut.

**MATRIKS CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA APBD TAHUN 2022**

No	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Outcome/ Output)	REALISASI (Outcome/ Output)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	1. Penetapan kebijakan daerah, koorDinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi.	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			1. Kesetaraan gender ( <i>gender equality</i> ) merupakan permasalahan lintas sector ( <i>crosscutting issues</i> ) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi.	1. Pelayanan dan Perlindungan Terhadap Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	
			2. KoorDinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	2. Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kab/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan	2. Membangun Jejaring Lintas Sektor, Program, Akademis, Tokoh Agama dan Adat Dayak	
			3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen		3. Regulasi dalam Bentuk Peraturan Gubernur dan Surat Edaran	
			4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi.					4. Promosi, Edukasi dan Informasi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial	
			5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan					5. Memperkuat UPTD – PPA di Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan Anak terutama dalam penurunan angka Peakaian Usia Anak di Kalimantan Tengah	
								6. Dimasa pandemi Covid 19 melakukan koorDinasi baik pembinaan dan monitoring dengan virtual	
								7. Memberikan Revvard dan Punishment untuk kinerja ASN	

No	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Outcome/ Output)	REALISASI (Outcome/ Output)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			<p>perlindungan anak skala provinsi.</p> <p>6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan 31ndicat atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.</p> <p>7. KoorDinasi pelaksanaan 31ndica informasi gender dan anak skala provinsi.</p> <p>8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).</p>				<p>oleh pemerintah di semua bidang.</p> <p>3. Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sector. Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia.</p> <p>4. Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di 31ndica informal yang belum terdata</p> <p>5. Anak Berdampak Covid-19 - Kalimantan Tengah 15 Juli 2021 berjumlah 29.390</p> <p>6. Ada stigma tabu dan aib di masyarakat untuk</p>	<p>di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>8. Dalam pencapaian kinerja berbasis Data dengan khususnya adanya Bidang Data dan Informasi di Dinas P3AAPKB yang berbeda dengan Dinas lain, adapun uraian tugas Bidang Data dan Informasi</p> <p>9. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;</p> <p>10. penyiapan forum koorDinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;</p> <p>11. penyiapan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;</p> <p>12. penyiapan koorDinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;</p>	

No	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Outcome/ Output)	REALISASI (Outcome/ Output)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							melaporkan tidak kekerasan baik pada Perempuan dan anak	3. penyiapan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan,	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	7. Anak berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, terlantar, mengalami putus sekolah.		
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			8. Perkawinan Usia Anak 9. Perceraian 10. Tingkat Kemiskinan		
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	11. Kasus Tindak Kekerasan dalam rumah tangga		
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>					
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Outcome/ Output)	REALISASI (Outcome/ Output)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>					
				Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	7 Dokumen	7 Dokumen			
				<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>					
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. Dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen			

No	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Outcome/ Output)	REALISASI (Outcome/ Output)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>					
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan KoorDinasi Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen			
2.	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah 34indicator reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi.</li> <li>2. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS,</li> </ol>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stunting</li> <li>2. Bonus Demografi;</li> <li>3. Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga;</li> <li>3. Angka Kematian Ibu Dan Bayi Masih Tinggi;</li> <li>4. Penurunan Penggunaan Kontrasepsi Modern;</li> <li>5. Rendahnya Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas</li> <li>2. Sasaran yang ingin dicapai adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 – 49 tahun)</li> </ol> </li> </ol>	

No	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Outcome/ Output)	REALISASI (Outcome/ Output)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			<p>IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> <p>3. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.</p> <p>4. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi.</p> <p>5. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi.</p> <p>6. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro Pengendalian Penduduk dan KB.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di</p>				<p>Dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga;</p> <p>6. .Kebutuhan Ber-KB Pasangan Usia Subur Yang Belum Terlayani (Unmet Need) Masih Tinggi.</p> <p>7. Rendahnya Keluarga Yang Mengetahui Fungsi Keluarga:</p>	<p>b.Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)</p> <p>3. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non – MKJP</p> <p>4. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah</p> <p>a.Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</p> <p>b.Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun)</p> <p>5. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai KB dan kesehatan reproduksi Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah a. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)</p>	

No	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Outcome/ Output)	REALISASI (Outcome/ Output)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								<p>6. Penguatan tata kelola, Berbasis penelitian, dan pengembangan bidang KB untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Pengendalian Penduduk dan KB</p> <p>7. Membangun Jejaring Lintas Program dan Lintas Sektor dan Juga Akademisi, DAD, Tokoh Agama , CSR dan Duania Usaha dalam pecapaian Urusan DINAS P3APPKB</p> <p>8. Membuat Regulasi dan bentuk PERDA dan Pergub sesuai Urusan P3APPKB</p> <p>9. Peningkatan SDM baik dalam diklat dan Pelatihan<sup>2</sup> dan juga Penambahan SDM sesuai kompetensi</p> <p>10. Memperkuat Ketahanan Keluarga mulai dari Keluarga dalam pencegahan masalah : Perekonomian keluarga, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Stunting.</p>	



No	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Outcome/ Output)	REALISASI (Outcome/ Output)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								<p>11. Dimasa pandemi Covid 19 melakukan koorDinasi baik pembinaan dan monitoring dengan virtual</p> <p>12. Memberikan Revvard dan Punishment untuk kinerja ASN di Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>13. Dalam pencapaian kinerja berbasis Data dengan khususnya adanya Bidang Data dan Informasi di Dinas P3AAPKB yang berbeda degan Dinas lain, adapun uraian tugas Bidang Data dan Informasi</p> <p>14. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;</p> <p>15. penyiapan forum koorDinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi,</p>	

No	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Outcome/ Output)	REALISASI (Outcome/ Output)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								<p>dan partisipasi masyarakat;</p> <p>16. penyiapan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;</p> <p>17. penyiapan koorDinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;</p> <p>18. penyiapan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan,</p>	

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran harus lebih cermat agar tidak menghambat pencapaian kinerja *output* dan *outcome* dengan mempertimbangkan Program/Kegiatan prioritas.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif guna mendukung proses pelaksanaan pencapaian kinerja di bidang layanan masing-masing.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Melalui Laporan Capaian Kinerja Dinas P3APPKB Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk Renstra terbaru sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

# **BAB III**

## **KEBIJAKAN STRATEGI YANG DITETAPKAN**

Matriks Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

### **MATRIKS KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.		<b>N I H I L</b>	

# BAB IV

## TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2021

### Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun 2021 (Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2022)

No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PD TERKAIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.2.7	<p>Berdasarkan LKPj Gubernur Kalteng Akhir Tahun 2021, terdapat adanya <b>penurunan angka kelangsungan hidup bayi</b> di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini <b>perlu perhatian khusus</b> dari Gubernur, karena hal tersebut tidak hanya menjadi beban Dinas Kesehatan, tetapi juga menjadi beban dan tanggung jawab dinas terkait lainnya, dalam hal ini Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk bekerjasama menekan angka kematian bayi, meningkatkan Usia Harapan Hidup. Selain itu peran Posyandu harus terus ditingkatkan dengan tetap menerapkan <b>standar protokol kesehatan</b>.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan angka kelangsungan hidup Ibu dan bayi melalui Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dengan melakukan Advokasi Posyandu dalam Rangka Gerakan Sayang Ibu (GSI) yaitu dengan tujuan sebagai berikut :</p> <p>a) Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian pejabat pemerintah daerah dan sektor terkait tentang berbagai faktor yang menyebabkan kematian ibu dan peningkatan upaya penanggulangan secara <i>integrative</i>.</p> <p>b) Mekanisme rujukan sehingga keterlambatan pertolongan dapat dihindari.</p> <p>c) Meningkatkan upaya masyarakat dalam pendataan ibu hamil dan mengubah kebiasaan yang merugikan kesehatan ibu hamil.</p> <p>d) Meningkatkan peran dan institusi dan petugas kesehatan dalam upaya pendataan ibu hamil dan pelayanan kesehatan di Posyandu.</p>	<p>Hasil yang akan dicapai dari Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dengan melakukan Advokasi Posyandu dalam Rangka Gerakan Sayang Ibu (GSI) adalah sebagai berikut :</p> <p>a) Adanya komitmen dan tanggung jawab pejabat pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat dan keluarga terhadap upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.</p> <p>b) Berperan aktifnya institusi dan petugas kesehatan dalam upaya pendataan ibu hamil dan pelayanan kesehatan.</p> <p>c) Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu hamil.</p>	DP3APPKB

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang akan dikumpulkan secara kolektif oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya akan disampaikan oleh sekretariat daerah kepada kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 dengan mengacu pada kewenangan Perangkat Daerah DINAS P3APPKB, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan, tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2022, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Provinsi Kalimantan Tengah guna mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Kepala Dinas P3APPKB  
Provinsi Kalimantan Tengah,

**dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680717 199903 2 006

**Lampiran 1:**

**MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL ( *OUTCOME* )**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Elemen 1	Elemen 2	Capaian	Keterangan / Sumber Data
2.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD?  Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di provinsi?	Rp.38.043.819.370	Rp.1.125.926.067.513	3,38%	DINAS P3APPKB
2.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi?  Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)?	156 orang	925.010	1,68	DINAS P3APPKB
2.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan?  Jumlah penduduk perempuan?	190 orang	1.292.112 orang	14,71	DINAS P3APPKB
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	TFR (Angka Kelahiran Total)				2,31	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng (PK 21)
2.h.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern?  Jumlah Pasangan Usia Subur?			67,17%	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng (New SIGA)

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Elemen 1	Elemen 2	Capaian	Keterangan / Sumber Data
2.h.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani?  Jumlah Pasangan Usia Subur?			12,40%	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng (PK 21)

**Lampiran 2:**

**MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)**

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Output	IKK Output	Elemen	Keterangan/ Sumber Data
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	29 SOPD	DINAS P3APPKB
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	44 Program dan 67 Kegiatan	DINAS P3APPKB
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Media massa ( MMC, Kalteng Pos, RRI, & Radio Kalteng Pos)	DINAS P3APPKB
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	8 UPT PPA di Prov. Kalteng	DINAS P3APPKB
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	93,59%	DINAS P3APPKB
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	15 Lembaga di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 12 UPTD PPA dan 3 Dinas P3APPKB yang belum terbentuk UPTD PPA	DINAS P3APPKB
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1 (UPT PPA Prov. Kalteng)	DINAS P3APPKB



No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Output	IKK Output	Elemen	Keterangan/ Sumber Data
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3 Kebijakan : 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 71 Tahun 2013 3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/108/2020 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Tengah.	DINAS P3APPKB
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.3	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	15 Lembaga di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 12 UPTD PPA dan 3 Dinas P3APPKB yang belum terbentuk UPTD PPA	DINAS P3APPKB
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	92,11%	DINAS P3APPKB

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Output	IKK Output	Elemen	Keterangan/ Sumber Data
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	15 Lembaga di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 12 UPTD PPA dan 3 Dinas P3APPKB yang belum terbentuk UPTD PPA	DINAS P3APPKB
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1 (UPT PPA Prov. Kalteng)	DINAS P3APPKB
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	2.h.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Pengendalian Penduduk (GDPK) yang di-Perdakan	0	DINAS P3APPKB
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	2.h.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	19,7	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng (PK 21)
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	2.h.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	36,2	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng(PK 21)
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	2.h.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	66,02%	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng (PK 21)
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	2.h.1	Jumlah <i>stakeholders</i> /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	30	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng (Hubalila)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	2.h.2	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	62,42%	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng (Bidang KB)

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Output	IKK Output	Elemen	Keterangan/ Sumber Data
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	2.h.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	2.h.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1 PROV, 4 KAB/KOTA	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng (Bidang Advokasi dan KIE)
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	2.h.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	27,41%	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng (New SIGA & 1 Data Kalteng)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	2.h.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	63,72%	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng (New SIGA)
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan KB	2.h.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	0	DINAS P3APPKB, BKKBN Perwakilan Prov. Kalteng



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com  
KALIMANTAN TENGAH - 73112

## KORBAN KEKERASAN DEWASA DAN ANAK YANG TERLAYANI TAHUN 2022

REPORT KASUS & KORBAN ANAK DEWASA TERLAYANI  
KALIMANTAN TENGAH  
BASIS DATA TANGGAL KEJADIAN  
SEMESTER 1 S/D SEMESTER 2  
TAHUN 2022

No	Unit / Instansi	Kasus	Korban		Terlayani			
			N	Anak	Dewasa	% N	% Anak	% Dewasa
1	Barito Selatan	23	23	13	10	100.00	100.00	100.00
2	Barito Timur	5	5	3	2	100.00	100.00	100.00
3	Barito Utara	9	10	6	4	100.00	100.00	100.00
4	Gunung Mas	11	11	7	4	100.00	100.00	100.00
5	Kapuas	48	61	40	21	80.33	77.50	81.71
6	Katingan	15	15	10	5	93.33	100.00	80.00
7	Kota Palangkaraya	30	30	17	13	93.33	100.00	84.62
8	Kota Waringin Barat	36	36	34	2	100.00	100.00	100.00
9	Kota Waringin Timur	16	18	7	11	83.33	100.00	71.73
10	Lamandau	3	3	3	0	100.00	100.00	0
11	Murung Raya	5	6	5	1	83.33	80.00	100.00
12	Pulang Pisau	29	29	25	4	100.00	100.00	100.00
13	Seruyan	9	9	5	4	100.00	100.00	100.00
14	Sukamara	5	7	7	0	100.00	100.00	0
	TOTAL	244	263	182	81	92.78	94.51	88.89

Sumber Data : Simfoni PPA (UPT-PPA Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah)

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196807171999032006



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com  
KALIMANTAN TENGAH - 73112

### JUMLAH PENDUDUK KALIMANTAN TENGAH MENURUT KATEGORI UMUR

30 Juni Tahun 2022

NO	KATEGORI UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	0 - 4	99.032	91.528	190.560
2	5 - 9	128.040	120.233	248.273
3	10 - 14	134.794	126.139	260.933
4	15 - 19	115.497	109.747	225.244
5	20 - 24	120.284	112.865	233.149
6	25 - 29	112.111	106.093	218.204
7	30 - 34	112.780	109.760	222.540
8	35 - 39	114.692	111.041	225.733
9	40 - 44	112.712	103.977	216.689
10	45 - 49	97.003	87.978	184.981
11	50 - 54	79.634	70.395	150.029
12	55 - 59	57.730	51.434	109.164
13	60 - 64	41.406	37.567	78.973
14	65 - 69	25.614	23.130	48.744
15	70 - 74	14.616	14.176	28.792
16	>75	14.733	16.049	30.782
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>		<b>1.380.678</b>	<b>1.292.112</b>	<b>2.672.790</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Dukcapil, 2022



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

## PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) PADA SKPD SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI PAGU INDIKATIF	PERMASALAHAN/ KENDALA
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 1.044.189.107	
2.	Badan Kepegawaian Daerah	2. Program Kepegawaian Daerah	2. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 31.356.000	
		3. Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 251.688.000	
3.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4. Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 140.000.000	
		5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	5. Pembangunan sarana penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Rp 1.573.250.000	
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	6. Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 1.530.000.000	
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	7. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, dan Prajabatan (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) Peserta dari Kabupaten/kota	Rp 885.000.000	
			8. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, dan Prajabatan (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) Peserta dari Kabupaten/kota	Rp 809.200.000	
6.	Dinas Kehutanan	8. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	9. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp 449.230.000	
			10. Peningkatan Sumber daya Manusia Penyuluh Kehutanan	Rp 314.538.000	
			11. Penilaian Lomba Warna Lestari	Rp 430.000.000	
			12. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	Rp 211.958.750	
			13. Sekolah Lapang	Rp 380.683.600	
			14. Temu Teknis Kelompok Tani Hutan	Rp 122.106.000	
			15. Kampanye pencegahan karhutla dalam rangka penyadartahuan pencegahan karhutla	Rp 314.538.000	
			16. Penyuluhan Pencegahan karhutla	Rp 430.000.000	
		9. Program Pengelolaan Hutan	17. Kerangka kualifikasi nasional indonesia dan sertifikasi kompetensi bidang pengendalian karhutla	Rp 211.958.750	
7.	Dinas Sosial	10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	18. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di PSKW	Rp 593.796.850	
		11. Program Penanganan Bencana	19. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Rp 593.796.850	



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI PAGU INDIKATIF	PERMASALAHAN/ KENDALA
			20. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Rp 334.500.000	
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan	12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	21. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 MIL Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp 73.800.000	
		13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	22. Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Laut dan di kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 147.500.000	
		14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp 147.500.000	
		15. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	24. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai dengan 12 ML Sub Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai dengan 12 MIL	Rp 133.000.000	
9.	Dinas Pendidikan	16. Program Pengelolaan Pendidikan	25. Pengelolaan Pendidikan Khusus Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga	Rp 1.458.065.500	
		17. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26. Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rp 200.000.000	
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	27. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa dan Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 74.350.320	
11.	Biro Kesejahteraan Rakyat	19. Program Kesejahteraan Rakyat	28. Pembinaan Pemuda / Remaja Antar Agama 29. Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 75.000.000 Rp 75.000.000	
12.	Dinas Perhubungan	20. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	30. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rp 500.000.000	
13.	Dinas Kesehatan	21. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	31. Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, dan Anak Balita 32. Birnatek Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Jiwa/psikiatri dan atau napza 33. Orientasi Petugas Kesehatan dalam Melakukan pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi pasangan usia subur (PUS)/Calon Pengantin (Perencanaan kehamilan, Pelayanan KB dan pemeriksaan Calon Pengantin)	Rp 138.435.000 Rp 53.880.000 Rp 5.000.000	
14.	Dinas Lingkungan Hidup	22. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	34. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi/Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Rp 40.000.000	
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	35. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 283.500.000	
		24. Program Pengawasan Ketenagakerjaan	36. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Rp 100.000.000	



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI PAGU INDIKATIF	PERMASALAHAN/ KENDALA
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  26. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	37. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Sub Kegiatan: Pemanunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Kapuas 38. Sub Kegiatan: Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab.Sukamara  39. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Sub Kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Minum Daerah Kumuh Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur 40. Sub Kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Minum Daerah Kumuh Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur	Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000  Rp 1.300.000.000 Rp 1.300.000.000	
17.	Dinas Ketahanan Pangan	27. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	41. Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	-	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang Sumber anggaran Dana dari APBN, untuk TAHUN 2022 sudah tidak ada lagi.
18.	Badan Pendapatan Daerah	28. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	42. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Survey/pemantauan pelaksanaan pelayanan Masyarakat pada SAMSAT Se- Kalimantan Tengah)	Rp 290.142.500	
19.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	29. Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Provinsi  30. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha Sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha. 44.	Rp 12.000.000 Rp 45.000.000	
20.	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan	31. Program Kawasan Permukiman	45. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima belas) Ha	125.592.000 Rp 2.005.000.000	
21.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	32. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	46. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing WiraUsaha Muda Provinsi (Pelatihan Kewirausahaan Bagi pemuda dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha bagi wirausaha muda)	Rp 63.950.000	
22.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	33. Program Administrasi Umum	47. Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp 55.000.000	





## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI PAGU INDIKATIF	PERMASALAHAN/ KENDALA
		34. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	48. Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 49. Sub Bagian: Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50. Sub Kegiatan: Pembinaan Sumber Daya Manusia 51. Sub Kegiatan: Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis PBJ Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 83.807.000 Rp 187.278.400 Rp 125.000.000 Rp 100.000.000	
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	35. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	52. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 328.550.936	
24.	RSUD Doris Sylvanus	36. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  37. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	53. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53 Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 54 Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah 55 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 56. Sub Kegiatan: Pengembangan Rumah Sakit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 57 Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 58 Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular 59 Sub Kegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 60 Sub Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 61 Sub Kegiatan: Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 290.898.000 Rp 141.200.000 Rp 301.467.100 Rp 163.657.500 Rp 369.176.000 Rp 542.164.700 Rp 11.000.000.000 Rp 114.615.000 Rp 95.558.000	
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  40. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	62. Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi  63. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Bimbingan Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan Serbu Hari Pertama Kehidupan (HPK)	- 55.135.000 Rp 36.550.000	
26.	Dinas Perkebunan	41. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.504.091.000	
27.	Bappedalitbang	42. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	65. Sub Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 180.835.507	



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI PAGU INDIKATIF	PERMASALAHAN/ KENDALA
28.	Inspektorat	43. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66 Sub kegiatan:Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 1.000.000.000	
29.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	44. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	67 Sub Kegiatan:Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	Rp 70.330.000	
29 SKPD		44 PROGRAM	67 SUB KEGIATAN	Rp 38.043.819.370	

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



dr. LILIAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680717 199903 2 006



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

### TABEL LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN TERLAYANI UPT PPA TAHUN 2022

No.	Unit / Instansi	Kasus	Korban		Terlayani				
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	% Laki-laki	% Perempuan	% Total
1.	Barito Selatan	21	6	15	6	15	100.00	100.00	100.00
2.	Barito Timur	5	0	5	0	5	0	100.00	100.00
3.	Barito Utara	9	4	6	4	6	100.00	100.00	100.00
4.	Gunung Mas	11	0	11	0	11	0	100.00	100.00
5.	Kapuas	46	9	50	9	38	100.00	76.00	79.66
6.	Katingan	15	1	14	1	13	100.00	92.86	93.33
7.	Kota Palangkaraya	30	3	27	3	25	100.00	92.59	93.33
8.	Kotawaringin Barat	15	2	13	2	13	100.00	100.00	100.00
9.	Kotawaringin Timur	13	4	9	4	9	100.00	100.00	100.00
10.	Lamandau	3	0	3	0	3	0	100.00	100.00
11.	Murung Raya	4	2	3	1	3	50.00	100.00	80.00
12.	Pulang Pisau	27	6	21	6	21	100.00	100.00	100.00
13.	Seruyan	9	2	7	2	7	100.00	100.00	100.00
14.	Sukamara	5	1	6	1	6	100.00	100.00	100.00
TOTAL		213	40	190	39	175	97.50	92.11	93.04

Sumber Data : Simfoni PPA (UPT-PPA Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah)



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

### DATA KONSOLIDASI BERSIH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEMESTER I - TAHUN 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS KELAMIN			KK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	KOTAWARINGIN BARAT	142.067	134.130	276.197	88.685
2	KOTAWARINGIN TIMUR	215.352	202.157	417.509	130.230
3	KAPUAS	212.730	199.249	411.979	134.051
4	BARITO SELATAN	68.072	65.001	133.073	43.718
5	BARITO UTARA	81.619	75.963	157.582	49.844
6	KATINGAN	88.113	81.928	170.041	53.966
7	SERUYAN	78.027	71.599	149.626	48.137
8	SUKAMARA	32.650	29.737	62.387	20.234
9	LAMANDAU	54.969	48.803	103.772	36.744
10	GUNUNG MAS	68.651	62.249	130.900	41.100
11	PULANG PISAU	70.686	65.739	136.425	44.522
12	MURUNG RAYA	58.319	53.947	112.266	35.135
13	BARITO TIMUR	58.987	55.979	114.966	37.469
14	KOTA PALANGKA RAYA	150.436	145.631	296.067	93.089
KALIMANTAN TENGAH		1.380.678	1.292.112	2.672.790	856.924

Sumber : Direktorat Jenderal Dukcapil, 2022

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

DINAS P3A-PPKB

dr. **INA VICTORIA ADEN, M.M.Kes**  
Pemangku Utama Muda  
NIP. 196807171999032006



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamsno No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SUMBER
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,08 Rata-rata anak per Wanita	2.31	PK 21
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	65,01 %	67,17%	New SIGA
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,83 %	12,40%	PK 21
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 19)	25 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	36,2 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	PK 21
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,32 (Skala 0-100)	51,65	PK 21
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21 Tahun	19,7 Tahun	PK 21
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	29.374 Keluarga	29.374 Keluarga	Bidang KS



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	309 PIK Remaja & 89 BKR	309 PIK Remaja dan 89 BKR	Bidang KS
	3	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	454 Keluarga	454 Keluarga	Bidang KS
	4	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	80%	100%	Bidang KS
	5	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada Perencanaan	1 Prov & 8 Kab/Kota	1 Prov & 8 Kab/Kota	Bidang Dalduk
	6	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	46 Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	50 Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	Bidang Dalduk
	7	Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 prov & 4 kab/kota	1 prov & 4 kab/kota	Advokasi dan KIE
	8	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)	Bidang Dalduk
	9	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 prov & 4 kab/kota	1 dan 4 Kab Kota (Katingan, Barito Utara, Kotawaringin Timur dan Murung Raya)	Bidang Dalduk
	10	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	165 Kampung KB	165 Kampung KB	Bidang Dalduk



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

11	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	43,03%	62,42%	Bidang KB
12	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	52,63 Indeks (Skala 0-100)	90,81%	PK21
13	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	62,94 % peserta KB	63,72%	New SIGA
14	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	19,20%	9,15%	PK 21
15	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	34,30%	27,41%	New SIGA & 1 Data Kalteng
16	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	22 Stakeholder/ Mitra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komando Resort Militer 102/PJG</li> <li>2. TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>3. Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>5. Keuskupan Palangka Raya</li> <li>6. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>7. Organisasi Pita Putih Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>8. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Kalimantan Tengah</li> <li>9. Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Tingkat IV 12.07.03 Palangka Raya</li> <li>10. Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palangka Raya</li> <li>11. PT. Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Utama Palangka Raya</li> <li>12. Informasi Palangka Raya (@INFOPLK)</li> <li>13. Kalteng Pos Radio</li> <li>14. PT. Kalteng Cakrawala Media</li> <li>15. IVRI Kalimantan Tengah</li> <li>16. Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya</li> <li>17. Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palangka Raya</li> <li>18. Universitas Muhammadiyah Palangka Raya</li> <li>19. Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya</li> <li>20. Akademi Kebidanan Betang Asi Raya Palangka Raya</li> <li>21. Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya</li> <li>22. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer</li> <li>23. Universitas Kristen Palangka Raya</li> <li>24. Universitas PGRI Palangka Raya</li> <li>25. STIKES Eka Harap Palangka Raya</li> <li>26. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya</li> <li>27. STKIP Muhammadiyah Sampit</li> <li>28. Universitas Antakusuma Pangkalan Bun</li> <li>29. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>30. Ikatan Jumalis Televisi Indonesia</li> </ol>	Hubalila



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

17	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	65%	66,02%	PK 21
18	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	70%	85%	rata-rata realisasi tunjin PKB / Hubalila
19	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	New SIGA
20	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100% Wilayah Prov dan Kab/Kota	100%	Datin
21	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penetapan data parameter pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan.	1 prov & 5 Kab/kota	1 prov & 4 Kab/kota	Bidang Dalduk
22	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	54.649 Keluarga	54649	Bidang KS
23	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	398 PIK Remaja dan BKR	398	Bidang KS
24	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	114 Kelompok BKL	114	Bidang KS





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

25	Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	42 Kelompok UPPKA	42	Bidang KS
26	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan	28 Kampung KB	28	Bidang Dalduk
27	Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana	14 Kab/Kota	14 kab/kota	Bidang Dalduk
28	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokasi	422 Faskes	422 Faskes	Bidang KB
29	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	14 Kab/Kota	14	Bidang Dalduk

		30	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	2 Rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	Bidang Dalduk/Latbang
		31	Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB	14 kab/kota	Manajemen Kasus Stunting 56 kegiatan	Satgas Stunting / Bidang KB / Bidang KS
		32	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	15 kegiatan	15 kegiatan	Hubalila
		33	Jumlah Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi	1 dokumen (297 Kampung KB)	1 Dokumen	Satgas Stunting & Datin



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

	34	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	1 layanan (2 Kegiatan)	1 layanan (2 Kegiatan)	Advokasi dan KIE
	35	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	1 Layanan (14 Kab/Kota)	1 Layanan	Datin

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



dr. **LINAE VICTORIA ADEN, M.M.** Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680717 199903 2 006



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

## LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT DAERAH PROVINSI YANG TELAH DILATIH PUG TAHUN 2022

### DAFTAR HADIR PESERTA

PADA KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWILAYAHAN PROVINSI TAHUN 2022

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022

Tempat : Aula Rapat Bappedaliribang Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama	Jabatan	Instansi	No. Handphone	Tanda Tangan	
					Laki-Laki	Perempuan
1	dr. Linae Victoria Aden, MKes	Plt. Kadis DP3APKB	DP3APKB - Prov. Kalteng	082255113059		
2	Firlianti	PPW - UPR	PSEA - UPR	085249819919		
3	Bethxia - B	PPW - UPR	PSGA - UPR	0812-86852184		
4	AGUS - S	SEKRETARI	BAPPEKALITBANG	081349001769	✓	
5	TUKAS	Kabid Sosbudpms	Bappedaliribang	08138989500		
6	Mariana	Kabid. KHP	DP3APKB	08119231650		
7	SALLYDIN DAMANIK	PERENCANA MUDA	DISDIK	081350369551		
8	ERI GRANATHYUNI	PENYUSUN PROGRAM	DP3APKB	081351355300		
9	DILELI DHARMA.A	PERENCANA MUDA	DP3APKB	081		
10	ERNI YULIANI	Piarata Kearsipan	DPMPTSP	08225530574		



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamsco No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

No	Nama	Jabatan	Instansi	No Handphone	Tanda Tangan	
					Laki-Laki	Perempuan
30	Hrs. Christina	Stt	Sat pol pp Prov	085248731991		
31	Zuryen Wahyuni	Kabag TU Kea Setwan	SFTWAN	082159601348		
32	Aulia Anisah	FU	DESPTM	081345389919		
33	Soni	FU	"			
34	Fina Titani	FU	"			
35	Hendri Septon	Pengabala Datar	DUI Prov Kalteng	081360535139		
36	Pussy Kartina	Perencana muda	Dosis Prov. Kalteng	08525272914		
37	Nozliayati	Bappedalit base				
38	Fran Yuliana	Adminies Muda	Pm kes	0813 2666 2668		
39	Hrs Varianty	Staf Pelaksana	- -	082255115312		
40	Mi Yayu P	Mag Pelaksana	Bio Kesehatan	0852 33070871		



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kaleng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

No	Nama	Jabatan	Instansi	No. Handphone	Tanda Tangan	
					Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
45	SAIFUL RAHMANTHUS	KASUBSA & TU BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	085251107300		
46	Syaiful Rizal	pelaksana	DINAS PUPR PIAW	08134961416		
47	Rani	pelaksana	DINAS PUPR	082250451266		
48	HERU SETIAWAN	KASB. P.P	DITRANSGETRANS KALENG	08134808377		
49	JOAN D.P	pelaksana	BAPERBA	082120533154		
50	LESTARI LAMI	ANALIS PERENCANAAN	RD. OPS	085252900200		
51	Pute Andina H	pelaksana	BKD	08134900052		
52	DEBY A.	Ajela Perencanaan / Ksb PP	DPUPR	081250327539		
53	ISKANUK	Kasub. PP	DALAKES	081713027933		
54	Marini	Kesb Program Kes Asat	PLJ - Kes	08225024446		
55	Anna. H	Kabop. pengendalian	Ka Asling	081349197322		
56	Rushawati	Analisis Data Usaha	RD. PIAW	082350192631		



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

No	Nama	Jabatan	Instansi	No. Handphone	Tanda Tangan	
					Laki-Laki	Perempuan
57	YB MARAHAN	Perencana	Dimaker trans	08215210 7718		
58	Ainva Yetti	keb PPA	P8DD5	082154033474		
59	Evi Noer Endah	AKPD Ahli Muda	BKAD Kalteng	081349079707		
60	Elsey K	Perencana	Disdukcapil	081352092809		
61	Miharti	<del>AKAD</del> Belaksana	AKAD.	082158275779		
62	Jenny	keb. PP	PPB-PK	081349719049		
63	SAHENORA	pengad. umum	Bappedalitbang			
64	Hadni	pengad umum	Bappedalitbang			
65	Nawi	pengelola kegiatan	Bappedalitbang			
66	M. Yusuf		Bappedalitbang			
67	Dr. Amelia Hensaputri	Fungsional Analisis Kebijakan Muda	DP3A PPA - PROV. KALIMANTAN	082299740265		
68	Jumani	Perencana Ahli Pertama	DP3A PPA	08249011664		



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.	Badan Kepegawaian Daerah	2. Program Kepegawaian Daerah 3. Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
3.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4. Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Dinas Kehutanan	8. Program Pendidikan dan Pelatihan , Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 9. Program Pengelolaan Hutan
7.	Dinas Sosial	10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 11. Program Penanganan Bencana
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan	12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 15. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9.	Dinas Pendidikan	16. Program Pengelolaan Pendidikan 17. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
11.	Biro Kesejahteraan Rakyat	19. Program Kesejahteraan Rakyat
12.	Dinas Perhubungan	20. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
13.	Dinas Kesehatan	21. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
14.	Dinas Lingkungan Hidup	22. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 24. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 26. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
17.	Dinas Ketahanan Pangan	27. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
18.	Badan Pendapatan Daerah	28. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
19.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	29. Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Provinsi 30. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
20.	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan	31. Program Kawasan Permukiman
21.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	32. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
22.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	33. Program Administrasi Umum 34. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 35. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	36. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
24.	RSUD Doris Sylvanus	37. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 38. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian	39. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
	Penduduk dan Keluarga Berencana	
		40. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
26.	Dinas Perkebunan	41. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
27.	Bappedalitbang	42. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
28.	Inspektorat	43. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
29.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	44. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan
	<b>29 SKPD</b>	<b>44 PROGRAM</b>

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



dr. **MAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680717 199903 2 006





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547  
dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com  
KALIMANTAN TENGAH – 73112

**TVRI**  
KALIMANTAN TENGAH

**BERSIH JERNIH CANGGIH**

# KALTENG BICARA

Tema: "Perempuan Berdaya, Indonesia Maju"

LIVE STUDIO 1  
Selasa, 14 Desember 2021  
16.00 - 16.55 WIB

**dr. Ina Aden, M.M.Kes.**  
Pit. Kepala Dinas PSAPPKB Prov. Kalimantan Tengah

**Ny. Ivo Sugianto Sabran**  
Ketua TP PKK Prov. Kalimantan Tengah

tvri.go.id    YouTube TVRIKALTENG    Facebook TVRIKalteng    Instagram tvrikalteng

Sumber : MMC Kalteng Bicara – TVRI KALIMANTAN TENGAH



Sumber : MMC Kalteng Bicara – TVRI KALIMANTAN TENGAH



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547  
dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com  
KALIMANTAN TENGAH – 73112



Sumber : Radio KPFM



**Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Kalteng bersama  
Jumani Dese dan 45 lainnya.**

8 Jun 2021 · 🌐

Yuk pantengin Besok pagi, Rabu 9 Juni  
2021 pukul 10.15 - 10.55 WIB di [RRI Pro  
1 Palangka Raya](#) , jangan lupa yaaaa ...

**RRI** PRO 1  
Palangka Raya  
FM 99.2 MHz  
MW 1152 KHz

**Pengarutamaan Gender**  
*"Pentingnya Peran Keluarga  
Dalam Pencegahan Stunting"*

**Yenio, SE**  
Kepala Sekai Keluarga Berencana

**Aquarini**

**Rabu, 9 Juni 2021 , Pukul. 10.15 -10.55 WIB**

RRI RADIO @2021 RRI NET

Sumber : RRI Pro 1



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547  
dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com  
KALIMANTAN TENGAH – 73112

**PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**"Perompunan Kalimantan Tengah Tangguh di Masa Pandemi"**

**Hj .Lily Hadianle, SE, M.AP**  
Ketua Forum Puspa Kalteng

**Dr. Amella Henisaputri M.Pd**  
Kabid Data & Informasi  
DP3APPKB Prov.Kalteng

**Rabu,21 April 2021**  
10.00 - 11.00 WIB

**Host**  
**Aquarini**

RRITelou Go

**RRI**  
Palangka Raya

**PRO 1**  
RRI 100.1 MHz  
RRI 100.1 MHz

[rri.co.id](http://rri.co.id)

Sumber : RRI Pro 1 Palangka Raya



Sumber : RRI Pro 1 Palangka Raya



Sumber : RRI Pro 1 Palangka Raya



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547  
dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com  
KALIMANTAN TENGAH – 73112

SUMBER : KORAN KALTENG POS

KALTENG POS • Senin, 7 Maret 2022

## Tekan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

**Kami minta agar dinas terkait bisa melakukan upaya cepat dan tanggap. Jangan dibiarkan terlalu lama, takutnya korban semakin banyak**

Sri Lestari  
Anggota DPRD Kobar

**PANGKALAN BUN**-Aktivitas kekerasan seksual terhadap anak masih saja terjadi dan merendahkan di wilayah kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Supaya nantinya tidak membuat semakin parah dan jauh korban banyak, diperlukan langkah dan upaya dari pemerintah.

Anggota DPRD Kobar Sri Lestari, meminta agar pemerintah melalui dinas terkait agar bisa melakukan tindakan. Salah satunya agar turun tangan melakukan upaya sosialisasi agar kejadian seperti ini tidak terus terjadi. Mengingat para korban yang semakin banyak ada di bawah umur. Sehingga harus ada langkah dan tindakan tepat, kalau dibiarkan akan semakin merendahkan.

"Kami minta agar dinas terkait bisa melakukan upaya cepat dan tanggap. Jangan dibiarkan terlalu lama, takutnya korban semakin banyak," kata Lestari.

Politikus dari Partai Gerindra ini menambahkan, berkaitan dengan aksi yang dilakukan beberapa kali juga ditemukan di area pesantren. Sehingga harus segera dilakukan evaluasi untuk memantau dan mencari informasi sejauh mana pelanggaran yang sudah dilakukan. Apalagi jika korban yang sempat meninggal dunia akibat kekerasan seksual. Diharapkan seluruh elemen masyarakat, untuk mendukung dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Semoga kejadian ini yang terakhir kalinya dan perlu tindakan tegas, pungkasnya (suami) bisa dilakukan upaya cepat dan tanggap. Jangan dibiarkan terlalu lama, takutnya korban semakin banyak," kata Lestari.

KALTENG POS • Senin, 17 Januari 2022

## Angka Stunting di Empat Kecamatan Mengalami Kenaikan

**SAMPIT** - Pemerintah Kota Sampit telah menetapkan Kabupaten Kotim sebagai salah satu kabupaten lokasi penanganan stunting dengan angka mencapai 48,84 persen dan merupakan Kabupaten tertinggi di Kalimantan Tengah.

Tahun 2021 kasus stunting di Kabupaten Kotim ada mengalami kenaikan, dari 17 Kecamatan yang ada hanya empat Kecamatan yang mengalami kenaikan kasus stunting yaitu Mentawa Baru Ketapang, Kota Besi, Cempaga dan Parenggean, sementara Kecamatan lainnya mengalami penurunan.

"Kasus stunting di Kabupaten Kotim mengalami kenaikan di empat Kecamatan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu keterlibatan banyak pihak dan inovasi yang terbaik. Terutama Satuan Organisasi Perangkat Daerah melalui bidang masing-masing harus ekstra bekerja di lapangan. Agar angka stunting dapat berkurang," kata Bupati Kabupaten Kotim H. Halikinnor Juma (PDI Perjuangan).

Menurutnya edukasi terhadap orangtua juga harus diutamakan terus menerus karena tidak sedikit akibat kurangnya pengetahuan para orang tua berdampak terhadap pertumbuhan anak-anak mereka, selain itu permasalahan kesehatan juga diharapkan membantu baik dalam pembinaan atau hal lainnya. Sehingga, upaya bersama tersebut bisa memberikan efek positif terhadap angka stunting di daerah ini.

"Untuk menangani stunting ini, kami telah menentukan lokasi prioritas penanganan. Dimana dari 10 menjadi 29 Desa di wilayah yang tercatat angka stunting yang tinggi. Namun kasus stunting ini kalau secara umum di Kotim mengalami penurunan sebesar 4,25 persen dibandingkan tahun 2020," jelasnya.

Berdasarkan Entry E-PPG-BM tahun 2020 di Kabupaten Kotim untuk sasaran belia sebanyak 12.727 orang, dari jumlah tersebut anak dan



**REMBUK STUNTING KABUPATEN KOTIM**

**PENANDATANGANAN:** Bupati Kotim H. Halikinnor menandatangani komitmen bersama dalam menangani kasus stunting di daerah ini, beberapa waktu lalu.

gan pertumbuhan sangat pendek tercatat 1.269 dan 2.230 pendek. Sehingga kasus stunting sebesar 27,49 persen. Sementara di tahun 2021 jumlah sasaran sebanyak 13.612 balita, tercatat 1.123 anak dengan pertumbuhan sangat pendek dan 2.405 pendek. Kasus stunting pada tahun ini sebesar 23,25 persen.

"Kalau kita melihat dari kasus yang terjadi tersebut, secara keseluruhan Kabupaten Kotim mengalami penurunan kasus sebanyak 4,25 persen dari tahun 2020 lalu, kita berharap tahun 2022 ini kasus stunting di daerah dapat menurun," tutupnya. (buh/am)

KALTENG POS • Kamis, 1 Desember 2022

## Perlu Kebersamaan Menyelesaikan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

**PALANGKA RAYA** Sebagai anggota hukum yang ditugaskan dalam UU (194) terdapat Tujuan utama penegakan hukum untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, keamanan, ketertarikan, dan kenyamanan dalam masyarakat. Ketika tujuan tersebut tidak akan terwujud tentu ada kerja sama dan semua pihak baik penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat.

Penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketika tujuan tersebut tidak akan terwujud tentu ada kerja sama dan semua pihak baik penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat.

Anggota DPRD Palangka Raya, sebagai koordinator Komisi IV DPRD Palangka Raya, meminta agar pemerintah melalui dinas terkait agar bisa melakukan tindakan. Salah satunya agar turun tangan melakukan upaya sosialisasi agar kejadian seperti ini tidak terus terjadi. Mengingat para korban yang semakin banyak ada di bawah umur. Sehingga harus ada langkah dan tindakan tepat, kalau dibiarkan akan semakin merendahkan.

"Kami minta agar dinas terkait bisa melakukan upaya cepat dan tanggap. Jangan dibiarkan terlalu lama, takutnya korban semakin banyak," kata Lestari.

Politikus dari Partai Gerindra ini menambahkan, berkaitan dengan aksi yang dilakukan beberapa kali juga ditemukan di area pesantren. Sehingga harus segera dilakukan evaluasi untuk memantau dan mencari informasi sejauh mana pelanggaran yang sudah dilakukan. Apalagi jika korban yang sempat meninggal dunia akibat kekerasan seksual. Diharapkan seluruh elemen masyarakat, untuk mendukung dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Semoga kejadian ini yang terakhir kalinya dan perlu tindakan tegas, pungkasnya (suami) bisa dilakukan upaya cepat dan tanggap. Jangan dibiarkan terlalu lama, takutnya korban semakin banyak," kata Lestari.



**PELATIHAN:** Koordinator Kepala Kalteng Dr. Erlanto N. SH.MH mengajar pemateri pada kegiatan di Hotel Aquarius, Selasa (29/11).

yang ada di dinas (UPI P3APPKB) harus memahami betul tugas dan fungsi masing-masing sebagai mana diatur dalam Perda Kalteng No 37 Tahun 2016 yang berfungsi untuk mengatur kebijakan teknis, kebijakan administratif dan substansi kebijakan pemerintah, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan perempuan, perlindungan anak termasuk untuk lain yang terkait dalam rangka undang undang nomor harus disesuaikan dengan latar belakang, modal perubahan serta akibat yang ditimbulkan dengan memperhatikan standar keahlian peradilan hukum yang berlaku yang terdapat pada daerah masing-masing sehingga ketika ada pelanggaran atau masalah dapat segera diteliti dan ditindaklanjuti.


Ketika lanjut Dr Erlanto N. menyampaikan bahwa bahwa sangat penting untuk memperhatikan kasus-kasus terkait kekerasan perempuan dan anak sampai tingkat kebijakan pada di tingkat yang bersangkutan karena tersebut ada sehingga itu perlu perhatian kita semua agar semua bisa diproses dengan sebagai tujuan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Disamping itu ada kendala penegakan hukum perkara antara lain kondisi saksi korban saat memberikan kesaksian di pengadilan masih dalam keadaan trauma, bahkan beberapa kali pengadilan saksi korban tidak hadir dalam persidangan sehingga tetap sedikit menghambat jalannya persidangan yang dituntut dengan kendala wilayah yang relatif jauh sehingga menghambat proses koordinasi atau penegak hukum

Harapan besar kepada para aktif semua jajaran dinas penegakan perempuan dan anak dalam melindungi anak dan perempuan selaku korban kekerasan tidak hanya juga diharapkan pemerintah namun juga di persidangan bahkan saat setelah persidangan hukuman kepada pelaku karena kenyataannya penyidikan terhadap trauma akibat ketika saksi apabila kasus terjadi di lingkungan rumah tangga, maka diperlukan saksi yang harus dapat persidangan yang serius.

Memperbaiki kegiatan penyidikan yang melibatkan penegak hukum, dinas terkait, tokoh adat, pemuda dan anggota ke daerah-daerah pengantar, perkembangan, kelompok masyarakat lokal, organisasi masyarakat dan kepedulian dan budaya yang harus dimaksimalkan dampak kekerasan perempuan dan anak serta diharapkan dapat menjadi salah satu langkah preventif mengurangi kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Kalteng kata Dr. Erlanto menambahkan. (hms/ala)

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680717 199903 2 006



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com  
KALIMANTAN TENGAH - 73112

### KORBAN KEKERASAN DEWASA DAN ANAK YANG TERLAYANI TAHUN 2022

REPORT KASUS & KORBAN ANAK DEWASA TERLAYANI  
KALIMANTAN TENGAH  
BASIS DATA TANGGAL KEJADIAN  
SEMESTER 1 S/D SEMESTER 2  
TAHUN 2022

No	Unit / Instansi	Kasus	Korban			Terlayani		
			N	Anak	Dewasa	% N	% Anak	% Dewasa
1	Barito Selatan	23	23	13	10	100.00	100.00	100.00
2	Barito Timur	5	5	3	2	100.00	100.00	100.00
3	Barito Utara	9	10	6	4	100.00	100.00	100.00
4	Gunung Mas	11	11	7	4	100.00	100.00	100.00
5	Kapuas	48	61	40	21	80.33	77.50	81.71
6	Katungan	15	15	10	5	93.33	100.00	80.00
7	Kota Palangkaraya	30	30	17	13	93.33	100.00	84.62
8	Kota Waringin Barat	36	36	34	2	100.00	100.00	100.00
9	Kota Waringin Timur	16	18	7	11	83.33	100.00	72.73
10	Lamandau	3	3	3	0	100.00	100.00	0
11	Murung Raya	5	6	5	1	83.33	80.00	100.00
12	Pulang Pisau	29	29	25	4	100.00	100.00	100.00
13	Seruyan	9	9	5	4	100.00	100.00	100.00
14	Sukamara	5	7	7	0	100.00	100.00	0
	TOTAL	244	268	182	81	92.78	94.51	88.89

Sumber Data : Simfoni PPA (UPT-PPA Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah)

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KERAJAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS P3A-PPKB

dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M. Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680717 199903 2 006



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com  
KALIMANTAN TENGAH - 73112

### JUMLAH PENDUDUK KALIMANTAN TENGAH MENURUT KATEGORI UMUR

30 Juni Tahun 2022

NO	KATEGORI UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	0 - 4	99.032	91.528	190.560
2	5 - 9	128.040	120.233	248.273
3	10 - 14	134.794	126.139	260.933
4	15 - 19	115.497	109.747	225.244
5	20 - 24	120.284	112.865	233.149
6	25 - 29	112.111	106.093	218.204
7	30 - 34	112.780	109.760	222.540
8	35 - 39	114.692	111.041	225.733
9	40 - 44	112.712	103.977	216.689
10	45 - 49	97.003	87.978	184.981
11	50 - 54	79.634	70.395	150.029
12	55 - 59	57.730	51.434	109.164
13	60 - 64	41.406	37.567	78.973
14	65 - 69	25.614	23.130	48.744
15	70 - 74	14.616	14.176	28.792
16	>75	14.733	16.049	30.782
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>		<b>1.380.678</b>	<b>1.292.112</b>	<b>2.672.790</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Dukcapil, 2022



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

## LEMBAGA LAYANAN ANAK YANG TELAH DILATIH - SURAT UNDANGAN KEGIATAN PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SE KALIMANTAN TENGAH



### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Muljana No. 1, Palangka Raya 73111  
Telepon/Faksimil (0536) 3237106 Email : sekretariat@kalteng.go.id

Palangka Raya, 23 November 2022

Kepada

Nama: **005/PPD/Bid-IV/DP3APPKB** Yth: **(Kantor Kalimantan Tengah)**  
Jabatan: **3 (tiga) orang** di - **Palangka Raya**  
Kategori: **Undangan Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Se Kalimantan Tengah**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap anak, keluarga secara komprehensif bagi perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan kegiatan **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelenggara Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan melalui "Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Se Kalimantan Tengah"** Subbagian dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud diutamakan kesediaannya menunjuk tenaga Pendamping/Petugas/Penyalur Layanan yang menangani kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KKA) sebagai Peserta pada:

Hari/Tanggal: **Senin, Selasa 28 - 29 November 2022**  
Waktu: **Jadwal Terlampir**  
Tempat: **Royal Crown Lt. 3 - Hotel Apurina, Beutapie, Jalan Insan Barokel No. 2 Palangka Raya**

Pastikan bahwa menanggung Biaya Paket Meeting Full Day dan Transport Peserta Lokal, sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Peserta Kabupaten (Uang Harian, Transport dan Penginapan) ditanggung oleh instansi masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak E. Evangelis, M.Si (0812 5317 3201) atau Ibu Sei Purwati, S.Sos (0821 2648 7223) dan mohon kiranya dapat melampirkan **Surat Tugas**

Demi kelain kesempatan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:  
Kepala Kantor Kalimantan Tengah (sebagai laporan)

LANJUTAN: UNDANGAN SEBARUTAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR: 005/PPD/Bid-IV/DP3APPKB  
HAL: UNDANGAN KEGIATAN PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SE KALIMANTAN TENGAH

No	INSTANSI/UNIT ORGANISASI	Jumlah Peserta
<b>A. FORKOPIMDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		
1.	GOVERNOR KALIMANTAN TENGAH	1 ORANG
2.	REGENT/DABIRAH KALIMANTAN TENGAH	1 ORANG
3.	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH	1 ORANG
4.	KEPIMPINAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH E.g. BUPATI BUKIT BARISAN/INDEH/PALEMBANG KALIMANTAN TENGAH	1 ORANG
<b>B. ORGANISASI PERANEGAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		
1.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KALIMANTAN TENGAH	2 ORANG
2.	KEPALA DINAS SOSIAL, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 ORANG
<b>C. DINAS PPA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TENGAH</b>		
1.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KABUPATEN ANGGRA RAYA	2 ORANG
2.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN KATINGAN	2 ORANG
3.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	2 ORANG
4.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN	2 ORANG
5.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2 ORANG
6.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SUKAMARA	2 ORANG
7.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNG RAYA	2 ORANG
8.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO KUALA	2 ORANG
9.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BARITO SELATAN	2 ORANG
10.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KABUPATEN BARITO TIMUR	2 ORANG
11.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA	2 ORANG
12.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MURUNG RAYA	2 ORANG
13.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN PULANG PISAH	2 ORANG
14.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAHAJAN	2 ORANG
<b>D. POLRES KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		
1.	KANWIL POL ANGGRA RAYA E.g. UNIT PPA POLRES PALANGKA RAYA	1 ORANG

Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan

: 15 Lembaga di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 12 UPTD PPA dan 3 Dinas P3APPKB yang belum terbentuk UPTD PPA

Palangka Raya, 06 Februari 2023  
**KEPALA DINAS P3APPKB  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**  
  
**dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680717 199903 2 006



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

### LEMBAGA LAYANAN ANAK YANG TELAH DILATIH YANG TELAH MEMILIKI STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022

NO	KAB/KOTA	KELAS	REGULASI
1.	Kab. Barito Utara	A	PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NO. 35 TAHUN 2018
2.	Kab Lamandau	B	PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 74 TAHUN 2020
3.	Kab. Katingan	B	PERBUP KATINGAN NOMOR 1 TAHUN 2021
4.	Kab.Pulang Pisau	B	PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 11 TAHUN 2021
5.	Kab. Kotawaringin Barat	A	PERBUP KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021
6.	Kota Palangka Raya	A	PERDA WALIKOTA PALANGKARAYA NO 48 TAHUN 2020
7.	Kab.Kotim	A	PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 62 TAHUN 2022
8	Kab.Kapuas	B	PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2021

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KERALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680717-199903 2 006





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

**LEMBAGA LAYANAN ANAK YANG MENDAPATKAN BANTUAN  
KEUANGAN/FASILITAS OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
(APBD PROVINSI)**

SALINAN



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

jdth.kalteng.go.id

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



**dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680717 199903 2 006



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN ANAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

## LEMBAGA LAYANAN PEREMPUAN YANG TELAH DILATIH - SURAT UNDANGAN KEGIATAN PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SE KALIMANTAN TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan RFA, Nomor No. 1, Palangka Raya 73111  
Telp: (0536) 3224547 Email: sekretariat@kalteng.go.id

Palangka Raya, 23 November 2022

Kepada

Nomor: 005/918/BJU-IV/PSAPPKB  
Sifat: Penting  
Lampiran: 3 (tiga) lembar  
Hal: Undangan Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Se Kalimantan

Yth: *Akhlak Kalimantan*  
di - Palangka Raya

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif bagi perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumbah Daya Lembaga Penyedia Layanan Perencanaan bagi Perempuan Korban Kekerasan melalui "Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Se Kalimantan Tengah". Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud diarahkan kesediaan mengizinkan terdapat Pendamping/Petugas Penyedia Layanan yang menangani kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (P3A) sebagai Peserta pada

Hari/Tanggal: Senin - Selasa 28 - 29 November 2022  
Waktu: Jadwal Terlampir  
Tempat: Royal Crown Lt. 3 - Hotel Aquaria Boutique Jalan Jemari Hoopel No. 5 Palangka Raya

Panitia hanya menanggung Biaya Paket Meeting Full Day dan Transport Peserta Lokal, sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Peserta Kabupaten (Uang Harian, Transport dan Penginapan) ditanggung oleh Instansi masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Ir. Evangelis M.Si (0812-5257-3201) atau Ibu Sri Purmasari, S.Sis (0821-5648-7223) dan mohon kiranya dapat melampirkan **Surat Tugas**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
Des. H. VICTORIA ADEN, M.M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650610 199103 1 025

Embossan  
Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)

Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan

: 15 Lembaga di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 12 UPTD PPA dan 3 Dinas P3APPKB yang belum terbentuk UPTD PPA

LAMPIRAN: UNDANGAN SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR: 005/918/BJU-IV/PSAPPKB  
ISI: UNDANGAN KEGIATAN PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SE KALIMANTAN TENGAH

NO	DISTRIK/UNIT ORGANISASI	JUMLAH PESERTA
<b>A. FORKOPINDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		
1	KEBERSEKUTUAKAN KALIMANTAN TENGAH	1 ORANG
2	SEKRETARIAT DAERAH KALIMANTAN TENGAH	1 ORANG
3	KEPALA KEJAKSAAN PENGADILAN MANAJEMEN TENGAH	1 ORANG
4	KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH U.P. BENAKTA DIRESKRIBSI/ALFOLDA KALTENG KEPALA	1 ORANG
<b>B. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KALIMANTAN TENGAH	2 ORANG
2	KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 ORANG
<b>C. DINAS PPA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TENGAH</b>		
1	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KEL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEL. BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2 ORANG
2	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEL. KABUPATEN LAMANDAU	2 ORANG
3	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEL. KABUPATEN MUKAMARAH	2 ORANG
4	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEL. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	2 ORANG
5	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEL. KABUPATEN KOTAWARINGIN SELATAN	2 ORANG
6	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEL. KABUPATEN LAMANDAU	2 ORANG
7	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEL. KABUPATEN MUKAMARAH	2 ORANG
8	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KEL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNG MASA	2 ORANG
9	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KEL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARTISSEBAYAN DAN KABUPATEN BARTISSEBAYAN	2 ORANG
10	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEL. KABUPATEN BARTISSEBAYAN	2 ORANG
11	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KEL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARTISSEBAYAN	2 ORANG
12	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KEL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MURUNG BAYA	2 ORANG
13	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEL. KABUPATEN PULANG PISAU	2 ORANG
14	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEL. KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPINAN	2 ORANG
<b>D. POLRES KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		
1	KAPRES POLANGKA RAYA U.P. UNTP PPA POLRES PALANGKA RAYA	1 ORANG

Palangka Raya, 06 Februari 2023  
KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Des. H. VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650610 199903 2 006



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamsa No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

**JUMLAH KEBIJAKAN/PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN TERMASUK TPPO PADA PERANGKAT DAERAH  
YANG SUDAH DIEVALUASI**

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016



SALINAN

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana yang telah dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa pemerintah daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;
  - c. bahwa dalam rangka pencegahan maupun perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya sehingga perlu mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 71 Tahun 2013



**SALINAN**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 71 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- bahwa sebagai warga negara, perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan atas setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadapnya yang dapat menimbulkan korban fisik maupun psikis, sebagai bagian dari pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
  - bahwa perlindungan bagi perempuan dan anak, korban kekerasan adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan bebas dari segala perbuatan kekerasan yang dijamin oleh Pancasila sebagai falsafah negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam negara maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya;
  - bahwa walaupun perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan penyelenggaraannya, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai wujud penegakan Hak Asasi Manusia, namun dalam kenyataannya di Provinsi Kalimantan Tengah hingga saat ini, intensitas kekerasan yang mengakibatkan korban di pihak perempuan dan anak cukup tinggi, dan berbagai upaya perlindungannya menjadi terhambat karena tidak jelas prosedur dan mekanisme penyelenggaraannya;
  - bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/108/2020



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 188.44 / 114 / 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1957) Nomor 53, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958) Nomor 62 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).
3. Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian.;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kesehatan.;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.;

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
Pembina Muda  
NIP. 19680717 199903 2 006



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamsa No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

**TABEL LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN TERLAYANI UPT PPA  
TAHUN 2022**

No.	Unit / Instansi	Kasus	Korban		Terlayani				
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	% Laki-laki	% Perempuan	% Total
1.	Barito Selatan	21	6	15	6	15	100.00	100.00	100.00
2.	Barito Timur	5	0	5	0	5	0	100.00	100.00
3.	Barito Utara	9	4	6	4	6	100.00	100.00	100.00
4.	Gunung Mas	11	0	11	0	11	0	100.00	100.00
5.	Kapuas	46	9	50	9	38	100.00	76.00	79.66
6.	Katingan	15	1	14	1	13	100.00	92.86	93.33
7.	Kota Palangkaraya	30	3	27	3	25	100.00	92.59	93.33
8.	Kotawaringin Barat	15	2	13	2	13	100.00	100.00	100.00
9.	Kotawaringin Timur	13	4	9	4	9	100.00	100.00	100.00
10.	Lamandau	3	0	3	0	3	0	100.00	100.00
11.	Murung Raya	4	2	3	1	3	50.00	100.00	80.00
12.	Pulang Pisau	27	6	21	6	21	100.00	100.00	100.00
13.	Seruyan	9	2	7	2	7	100.00	100.00	100.00
14.	Sukamara	5	1	6	1	6	100.00	100.00	100.00
TOTAL		213	40	190	39	175	97.50	92.11	93.04

Sumber Data : Simfoni PPA (UPT-PPA Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah)



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

### DATA KONSOLIDASI BERSIH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEMESTER I - TAHUN 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS KELAMIN			KK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	KOTAWARINGIN BARAT	142.067	134.130	276.197	88.685
2	KOTAWARINGIN TIMUR	215.352	202.157	417.509	130.230
3	KAPUAS	212.730	199.249	411.979	134.051
4	BARITO SELATAN	68.072	65.001	133.073	43.718
5	BARITO UTARA	81.619	75.963	157.582	49.844
6	KATINGAN	88.113	81.928	170.041	53.966
7	SERUYAN	78.027	71.599	149.626	48.137
8	SUKAMARA	32.650	29.737	62.387	20.234
9	LAMANDAU	54.969	48.803	103.772	36.744
10	GUNUNG MAS	68.651	62.249	130.900	41.100
11	PULANG PISAU	70.686	65.739	136.425	44.522
12	MURUNG RAYA	58.319	53.947	112.266	35.135
13	BARITO TIMUR	58.987	55.979	114.966	37.469
14	KOTA PALANGKA RAYA	150.436	145.631	296.067	93.089
KALIMANTAN TENGAH		1.380.678	1.292.112	2.672.790	856.924

Sumber : Direktorat Jenderal Dukcapil, 2022

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,  
DINAS P3A-PPKB  
dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M. Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680717 199903 2 006



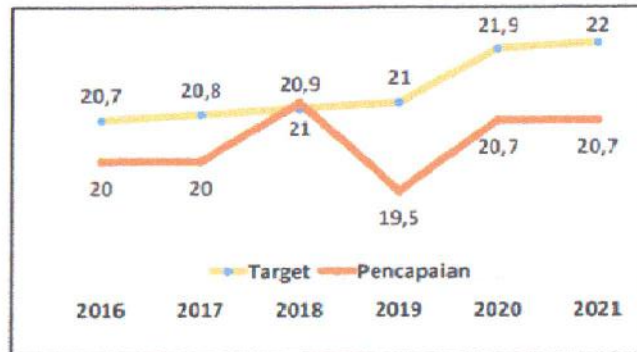
# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

### Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan 2016-2021: Nasional & Provinsi



#### Keterangan:

1. Perhitungan MUKP tahun 2016-2019 bersumber dari Survei Kinerja dan Akuntabilitas (SKAP) BKKBN
2. Perhitungan MUKP tahun 2020 bersumber dari estimasi trend Susenas 2016-2019
3. Perhitungan MUKP tahun 2021 bersumber dari Pendataan Keluarga 2021 dan tidak termasuk Prov. DKI Jakarta.
4. Seluruh provinsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Ada 9 provinsi dengan MUKP  $\geq$  22 tahun.

### MUKP menurut provinsi 2019-2021

Provinsi	PK2021	SKAP2019
Nusa Tenggara Timur	20,3	23,3
Kep. Riau	21,8	23,1
DI Yogyakarta	21,6	22,9
Maluku	20,3	22,9
Sumatera Utara	20,8	22,4
Bali	20,3	22,4
Sumatera Barat	20,4	22,2
Aceh	20,2	22,2
Papua Barat	21,7	22,1
Sulawesi Selatan	19,5	21,5
Riau	20,6	21,5
Maluku Utara	19,2	21,5
Sulawesi Utara	19,9	21,4
Kalimantan Utara	19,5	21,2
Papua	19,8	21,2
Kalimantan Timur	19,3	21,1
Jawa Tengah	19,5	20,8
INDONESIA	19,5	20,7
Kalimantan Barat	19,1	20,6
Banten	19,5	20,5
Lampung	19,2	20,5
Sumatera Selatan	19,6	20,5
Sulawesi Tenggara	18,7	20,4
Sulawesi Barat	18,9	20,4
Bengkulu	19,3	20,3
Gorontalo	18,9	20,3
Kep. Bangka Belitung	19,2	20,3
Jawa Timur	19,4	20,2
Nusa Tenggara Barat	19,2	20,2
Sulawesi Tengah	18,9	20,2
Jambi	19,1	20,0
Jawa Barat	18,8	19,8
Kalimantan Tengah	18,3	19,7
Kalimantan Selatan	18,6	19,7





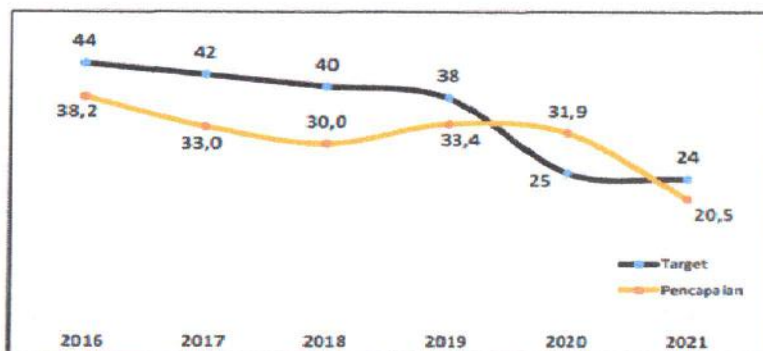
# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

## Target & Pencapaian ASFR [15-19] Tahun 2016 -2021 : Nasional dan Provinsi

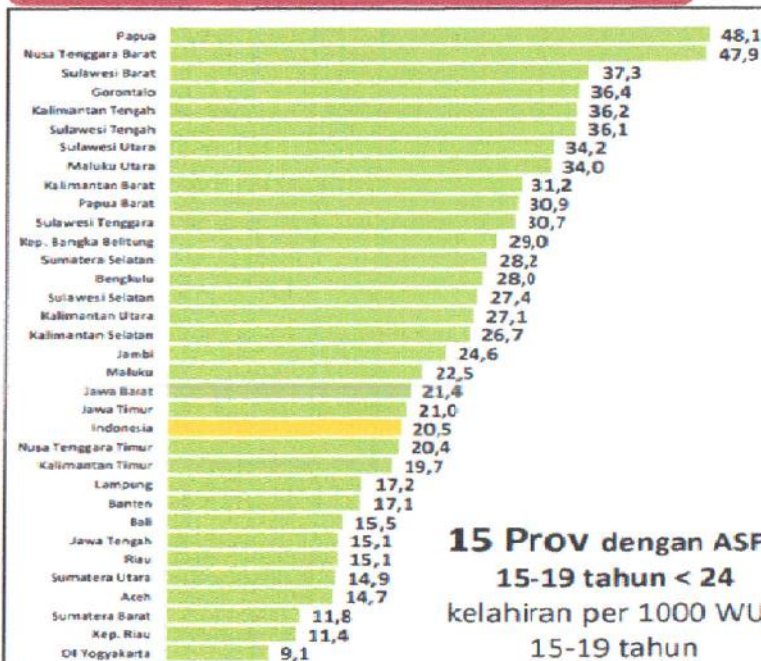


### Keterangan:

1. Perhitungan ASFR 15-19 tahun 2016-2019 bersumber dari Survei Kinerja dan Akuntabilitas (SKAP) BKKBN
2. Estimasi ASFR tahun 2020 menggunakan trend ASFR data SKAP 2016-2019
3. Perhitungan ASFR 15-19 tahun 2021 bersumber dari Pendataan Keluarga dan tidak termasuk provinsi DKI Jakarta. Khusus Papua dilakukan estimasi menggunakan SKAP 2016-2019 dengan distribusi geometrik
4. Provinsi dengan persentase tertinggi perkawinan anak [< 18 tahun].
  - Sulbar [19,4 persen]
  - Kalteng [19,1 persen]
  - Sultra [19 persen]

Sumber : Susenas 2018

## ASFR 15-19 tahun menurut provinsi 2021



**15 Prov dengan ASFR 15-19 tahun < 24 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun**



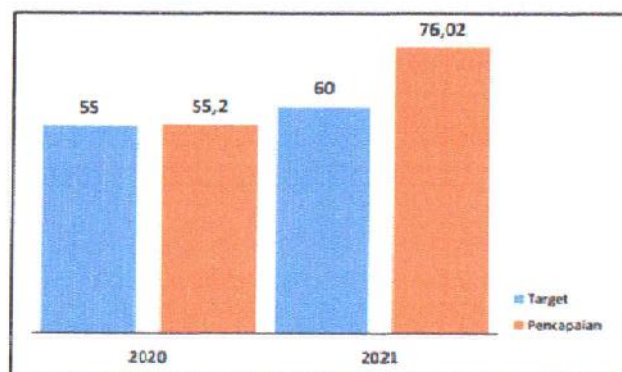
# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

## % Keluarga yang Terjangkau Program Bangsa Kencana 2020-2021: Nasional & Provinsi



### Keterangan :

1. Penghitungan persentase keluarga yang terjangkau program bangsa kencana tahun 2020 bersumber dari estimasi data SKAP 2016-2019
2. Perhitungan persentase keluarga yang terjangkau program bangsa kencana tahun 2021 bersumber dari Pendataan Keluarga 2021 dan tidak termasuk Prov. DKI Jakarta

## % Keluarga yang Terjangkau Program Bangsa Kencana menurut provinsi 2021



bkkbn

GORONTALO	80,26	85,29	82,78
BENGKULU	78,58	82,49	80,54
SULAWESI SELATAN	77,80	81,70	79,75
JAWA TENGAH	78,82	79,97	79,40
SUMATERA SELATAN	76,67	80,68	78,68
SUMATERA BARAT	75,79	80,07	78,43
JAMBI	76,37	79,86	78,12
ACEH	73,97	81,61	77,79
BAKI	76,30	78,90	77,60
JAWA BARAT	77,57	76,74	77,15
JAWA TIMUR	74,87	78,71	76,79
BANTEN	75,86	77,54	76,70
NASIONAL	74,86	77,19	76,02
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	76,36	75,60	75,98
SULAWESI UTARA	74,82	76,42	75,62
SULAWESI TENGGARA	72,21	77,43	74,82
LAMPUNG	71,50	77,15	74,52
SUMATERA UTARA	72,72	75,63	74,18
KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG	71,55	76,32	73,94
KEPULAUAN RIAU	76,17	71,44	73,80
SULAWESI BARAT	68,71	78,73	73,72
MALUKU UTARA	68,31	75,35	71,83
MALUKU	70,30	73,06	71,68
MUSA TENGGARA TIMUR	65,58	77,72	71,65
RIAU	70,64	70,01	70,33
MUSA TENGGARA BARAT	65,14	74,47	69,80
KALIMANTAN SELATAN	68,59	69,43	69,01
SULAWESI TENGAH	66,20	71,36	68,78
KALIMANTAN TIMUR	70,46	66,89	68,67
KALIMANTAN BARAT	67,25	68,16	67,71
KALIMANTAN TENGAH	65,48	66,56	66,02
KALIMANTAN UTARA	62,61	64,30	63,45
PAPUA BARAT	61,36	62,72	62,04
PAPUA	37,84	45,81	41,82

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS P3A-PPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196807171999032006



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SUMBER
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,08 Rata-rata anak per Wanita	2.31	PK 21
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	65,01 %	67,17%	New SIGA
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,83 %	12,40%	PK 21
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	25 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	36,2 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	PK 21
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,32 (Skala 0-100)	51,65	PK 21
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21 Tahun	19,7 Tahun	PK 21
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	29.374 Keluarga	29.374 Keluarga	Bidang KS



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	309 PIK Remaja & 89 BKR	309 PIK Remaja dan 89 BKR	Bidang KS
	3	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	454 Keluarga	454 Keluarga	Bidang KS
	4	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	80%	100%	Bidang KS
	5	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada Perencanaan	1 Prov & 8 Kab/Kota	1 Prov & 8 Kab/Kota	Bidang Dalduk
	6	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	46 Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	50 Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	Bidang Dalduk
	7	Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 prov & 4 kab/kota	1 prov & 4 kab/kota	Advokasi dan KIE
	8	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)	Bidang Dalduk
	9	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 prov & 4 kab/kota	1 dan 4 Kab Kota (Katingan, Barito Utara, Kotawaringin Timur dan Murung Raya)	Bidang Dalduk
	10	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	165 Kampung KB	165 Kampung KB	Bidang Dalduk



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

11	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	43,03%	62,42%	Bidang KB
12	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	52,63 Indeks (Skala 0-100)	90,81%	PK21
13	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	62,94 % peserta KB	63,72%	New SIGA
14	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	19,20%	9,15%	PK 21
15	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	34,30%	27,41%	New SIGA & 1 Data Kalteng
16	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	22 Stakeholder/ Mitra	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komando Resort Militer 102/PJG</li><li>2. TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah</li><li>3. Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah</li><li>4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah</li><li>5. Keuskupan Palangka Raya</li><li>6. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah</li><li>7. Organisasi Pita Putih Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah</li><li>8. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Kalimantan Tengah</li><li>9. Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Tingkat IV 12.07.03 Palangka Raya</li><li>10. Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palangka Raya</li><li>11. PT. Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Utama Palangka Raya</li><li>12. Informasi Palangka Raya (@INFOPLK)</li><li>13. Kalteng Pos Radio</li><li>14. PT. Kalteng Cakrawala Media</li><li>15. TVRI Kalimantan Tengah</li><li>16. Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya</li><li>17. Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palangka Raya</li><li>18. Universitas Muhammadiyah Palangka Raya</li><li>19. Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya</li><li>20. Akademi Kebidanan Betang Asi Raya Palangka Raya</li><li>21. Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya</li><li>22. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer</li><li>23. Universitas Kristen Palangka Raya</li><li>24. Universitas PGRI Palangka Raya</li><li>25. STIKES Eka Harap Palangka Raya</li><li>26. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya</li><li>27. STKIP Muhammadiyah Sampit</li><li>28. Universitas Antakusuma Pangkalan Bun</li><li>29. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah</li><li>30. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia</li></ol>	Hubalila



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

17	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	65%	66,02%	PK 21
18	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	70%	85%	rata-rata realisasi tunjin PKB / Hubalila
19	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	New SIGA
20	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100% Wilayah Prov dan Kab/Kota	100%	Datin
21	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penetapan data parameter pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan.	1 prov & 5 Kab/kota	1 prov & 4 Kab/kota	Bidang Dalduk
22	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	54.649 Keluarga	54649	Bidang KS
23	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	398 PIK Remaja dan BKR	398	Bidang KS
24	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	114 Kelompok BKL	114	Bidang KS



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamsa No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

25	Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	42 Kelompok UPPKA	42	Bidang KS
26	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan	28 Kampung KB	28	Bidang Dalduk
27	Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana	14 Kab/Kota	14 kab/kota	Bidang Dalduk
28	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon	422 Faskes	422 Faskes	Bidang KB
29	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	14 Kab/Kota	14	Bidang Dalduk
30	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	2 Rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	Bidang Dalduk/Latbang
31	Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB	14 kab/kota	Manajemen Kasus Stunting 56 kegiatan	Satgas Stunting / Bidang KB / Bidang KS
32	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	15 kegiatan	15 kegiatan	Hubalila
33	Jumlah Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi	1 dokumen (297 Kampung KB)	1 Dokumen	Satgas Stunting & Datin



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

		34	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	1 layanan (2 Kegiatan)	1 layanan (2 Kegiatan)	Advokasi dan KIE
		35	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	1 Layanan (14 Kab/Kota)	1 Layanan	Datin

Palangka Raya, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



dr. **LINAE VICTORIA ADEN**, M.M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680717 199903 2 006